

**Laporan Akhir  
Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi  
Tahun Anggaran 2013**



**KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOPWAN (KOPERASI  
WANITA) DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DI PROVINSI JAWA TIMUR**

**Tim Peneliti:**

**Dr. Tuti Budi Rahayu (NIDN 0012056804)  
Dra. Sutinah, MS (NIDN 0016085807)**

**Dibiayai oleh DIPA BOPTN Tahun Anggaran 2013 Sesuai Dengan  
Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga Tentang  
Kegiatan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi  
Nomor 7673/UN3/KR/2013, Tanggal 2 Mei 2013**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA  
Oktober, 2013**







**Laporan Akhir  
Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi  
Tahun Anggaran 2013**



**KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOPWAN (KOPERASI  
WANITA) DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DI PROVINSI JAWA TIMUR**

**Tim Peneliti:**

**Dr. Tuti Budi Rahayu (NIDN 0012056804)  
Dra. Sutinah, MS (NIDN 0016085807)**

**Dibiayai oleh DIPA BOPTN Tahun Anggaran 2013 Sesuai Dengan  
Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga Tentang  
Kegiatan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi  
Nomor 7673/UN3/KR/2013, Tanggal 2 Mei 2013**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA  
Oktober, 2013**



1. Judul Penelitian

**Kebijakan Pengembangan Kopwan (Koperasi Wanita) dan Pemberdayaan Perempuan di Provinsi Jawa Timur**

Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap
- b. NIDN
- c. Jabatan Fungsional
- d. Fakultas/Prodi
- e. Email

Dr. Tuti Budidahaya  
0012056804  
Lektor  
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Sosiologi  
tutibudirahayu@yahoo.com

Anggota (1)

- a. Nama Lengkap
- b. NIDN
- c. Perguruan Tinggi

Dra. Sutinah, MS  
0016085807  
Universitas Airlangga

Tahun Pelaksanaan

Tahun ke satu dari rencana dua tahun


Pembiayaan

- a. Tahun pertama
- b. Tahun kedua
- c. Biaya keseluruhan

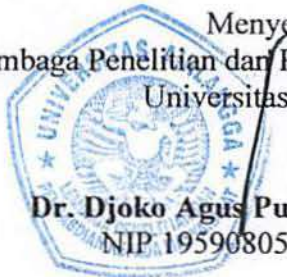
Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah)  
Rp. 60.000.000 (Enam puluh juta rupiah)  
Rp. 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah)

  
Wakil Dekan I FISIP Unair  
**Dr. Dwi Windyastuti Budi H., Dra, MA**  
NIP 1961092719881020010

Surabaya, 31 Oktober 2013  
Ketua Peneliti

  
**Dr. Tuti Budidahaya**  
NIP 196805121992032002

Menyetujui:  
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Universitas Airlangga

  
**Dr. Djoko Agus Purwanto, M.Si, Apt**  
NIP 195908051987011001

## RINGKASAN

Untuk memberi ruang dan meningkatkan potensi perempuan dalam aktivitas ekonomi dan sekaligus sebagai media bagi perempuan untuk beraktualisasi diri, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir telah memutuskan untuk memfasilitasi dan mendorong pengembangan koperasi yang khusus dikelola oleh perempuan, atau yang lazim disebut Koperasi Wanita (Kopwan). Meski di berbagai daerah disadari telah banyak lembaga keuangan mikro (LKM) yang eksis dan telah pula banyak melibatkan partisipasi kaum perempuan dalam pengelolaannya, namun dengan memastikan wadah yang lebih terlindungi secara hukum, yakni koperasi, diharapkan ruang gerak kaum perempuan dalam lembaga koperasi dan kiprah kaum perempuan dalam bidang ekonomi dapat lebih dipercepat dan diperluas.

Secara garis besar ada empat permasalahan yang dicoba dikaji, yaitu: (1) Sebagai Lembaga Keuangan Mikro, kendala dan situasi problematik apa sajakah yang dihadapi Kopwan dalam pengembangan dan pengelolaan modal usahanya?, (2) Bagaimana gambaran tentang mekanisme yang dikembangkan Kopwan di Jawa Timur dalam manajemen pengelolaan keuangan, aspek administrasi, produksi dan aspek pemasarannya?, (3) Sejauhmana keberadaan Kopwan di Jawa Timur mampu berperan dalam memenuhi kebutuhan sosial anggotanya, meningkatkan tingkat kesejahteraan anggota serta masyarakat di sekitarnya? Termasuk di sini, sejauhmana kehadiran Kopwan telah berperan sebagai media aktualisasi diri peran dan potensi perempuan?, dan (4) Sejauhmana kehadiran Kopwan di Jawa Timur telah mampu mendorong pertumbuhan usaha ekonomi kerakyatan di wilayahnya? Termasuk di sini, sejauhmana Kopwan mampu mandiri, bersaing dan menggantikan peran lembaga perkreditan informal yang acapkali merugikan masyarakat, seperti rentenir, *bank thithil* dan pengijon?

Lokasi kajian, ditetapkan di dua daerah, yaitu: Kabupaten Malang dan Kabupaten Tuban. Dari masing-masing kabupaten, selain diwawancarai secara mendalam (*in depth*) sejumlah nara sumber atau informan yang terlibat langsung sebagai pengurus dalam pengelolaan Kopwan (Ketua, Bendahara dan Sekretaris), juga dilakukan wawancara kepada anggota Kopwan yang pernah merasakan manfaat atau memperoleh pinjaman modal usaha dari Kopwan di daerah masing-masing.

Dari hasil kajian lapangan yang telah dilakukan, beberapa temuan pokok yang merupakan kesimpulan studi ini adalah: Pertama, sebagai lembaga keuangan mikro, faktor yang acapkali menghambat kinerja Kopwan dalam mendukung pengembangan UMKM dan upaya peningkatan kesejahteraan anggotanya di satu sisi adalah keterbatasan modal usaha yang dimiliki dan di sisi lain cara kerja rentenir atau pelepas uang lain yang umumnya sangat fleksibel, dan bersikap pro-aktif menjemput bola langsung mendatangi masyarakat ke rumah atau ke tempat kerja mereka. Meski sebagai modal awal dan tambahan modal selama ini Kopwan telah memperoleh kucuran dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, namun karena anggota yang harus dilayani dan yang membutuhkan bantuan pinjaman modal usaha jauh lebih besar jumlahnya, maka modal yang ada dan daya jangkau layanan Kopwan tetap saja masih belum memadai.

## RINGKASAN

Untuk memberi ruang dan meningkatkan potensi perempuan dalam aktivitas ekonomi dan sekaligus sebagai media bagi perempuan untuk beraktualisasi diri, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir telah memutuskan untuk memfasilitasi dan mendorong pengembangan koperasi yang khusus dikelola oleh perempuan, atau yang lazim disebut Koperasi Wanita (Kopwan). Meski di berbagai daerah disadari telah banyak lembaga keuangan mikro (LKM) yang eksis dan telah pula banyak melibatkan partisipasi kaum perempuan dalam pengelolaannya, namun dengan memastikan wadah yang lebih terlindungi secara hukum, yakni koperasi, diharapkan ruang gerak kaum perempuan dalam lembaga koperasi dan kiprah kaum perempuan dalam bidang ekonomi dapat lebih dipercepat dan diperluas.

Secara garis besar ada empat permasalahan yang dicoba dikaji, yaitu: (1) Sebagai Lembaga Keuangan Mikro, kendala dan situasi problematik apa sajakah yang dihadapi Kopwan dalam pengembangan dan pengelolaan modal usahanya?, (2) Bagaimana gambaran tentang mekanisme yang dikembangkan Kopwan di Jawa Timur dalam manajemen pengelolaan keuangan, aspek administrasi, produksi dan aspek pemasarannya?, (3) Sejauhmana keberadaan Kopwan di Jawa Timur mampu berperan dalam memenuhi kebutuhan sosial anggotanya, meningkatkan tingkat kesejahteraan anggota serta masyarakat di sekitarnya? Termasuk di sini, sejauhmana kehadiran Kopwan telah berperan sebagai media aktualisasi diri peran dan potensi perempuan?, dan (4) Sejauhmana kehadiran Kopwan di Jawa Timur telah mampu mendorong pertumbuhan usaha ekonomi kerakyatan di wilayahnya? Termasuk di sini, sejauhmana Kopwan mampu mandiri, bersaing dan menggantikan peran lembaga perkreditan informal yang acapkali merugikan masyarakat, seperti *rentenir*, *bank thithil* dan pengijon?

Lokasi kajian, ditetapkan di dua daerah, yaitu: Kabupaten Malang dan Kabupaten Tuban. Dari masing-masing kabupaten, selain diwawancarai secara mendalam (*in depth*) sejumlah nara sumber atau informan yang terlibat langsung sebagai pengurus dalam pengelolaan Kopwan (Ketua, Bendahara dan Sekretaris), juga dilakukan wawancara kepada anggota Kopwan yang pernah merasakan manfaat atau memperoleh pinjaman modal usaha dari Kopwan di daerah masing-masing.

Dari hasil kajian lapangan yang telah dilakukan, beberapa temuan pokok yang merupakan kesimpulan studi ini adalah: Pertama, sebagai lembaga keuangan mikro, faktor yang acapkali menghambat kinerja Kopwan dalam mendukung pengembangan UMKM dan upaya peningkatan kesejahteraan anggotanya di satu sisi adalah keterbatasan modal usaha yang dimiliki dan di sisi lain cara kerja *rentenir* atau pelepas uang lain yang umumnya sangat fleksibel, dan bersikap pro-aktif menjemput bola langsung mendatangi masyarakat ke rumah atau ke tempat kerja mereka. Meski sebagai modal awal dan tambahan modal selama ini Kopwan telah memperoleh kucuran dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, namun karena anggota yang harus dilayani dan yang membutuhkan bantuan pinjaman modal usaha jauh lebih besar jumlahnya, maka modal yang ada dan daya jangkauan layanan Kopwan tetap saja masih belum memadai.

Kedua, sebagai lembaga koperasi, manajemen pengelolaan keuangan Kopwan seringkali dihadapkan pada dilema antara mendahulukan efisiensi atau memilih lebih mendahulukan efektivitas pencapaian tujuan pendirian Kopwan. Sering terjadi pengurus Kopwan pada akhirnya lebih memilih mengembangkan pola pengelolaan yang mengedepankan efisiensi, yaitu memberikan pinjaman kepada anggota yang dinilai bisa memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan menunggak cicilan pinjaman daripada memberikan pinjaman kepada anggota Kopwan yang dinilai riskan menunggak pembayaran cicilan pinjaman.

Ketiga, bagi kaum perempuan di pedesaan kehadiran dan pendirian Kopwan di berbagai daerah, dalam batas-batas tertentu memang telah terbukti menjadi media yang fungsional bagi mereka untuk beraktualisasi diri di luar ranah domestik. Menjadi pengurus Kopwan, misalnya bagi sebagian kaum perempuan merupakan bentuk komitmen sekaligus kiprah mereka untuk beraktualisasi di ruang publik. Sementara itu, bagi kaum perempuan yang menjadi anggota Kopwan, kehadiran lembaga ini sedikit-banyak diakui juga telah merangsang tumbuhnya keterlibatan dan keberdayaan perempuan sebagai salah satu tiang penyangga ekonomi keluarga melalui berbagai kegiatan ekonomi kerakyatan yang mereka kembangkan berkat dukungan modal usaha dari Kopwan.

Keempat, nilai lebih dan sekaligus keuntungan meminjam ke Kopwan adalah karena lembaga ini dinilai memiliki mekanisme kerja yang nyaris sama dengan lembaga kredit informal, tetapi dari segi beban suku bunga yang harus ditanggung jauh lebih ringan daripada jika masyarakat meminjam ke rentenir yang acapkali mematok beban suku bunga yang tinggi. Yang menjadi masalah sekarang: meski pun prosedur meminjam ke Kopwan dinilai mudah dan suku bunga pinjaman juga relatif kecil, tetapi pinjaman modal usaha yang diperoleh kaum perempuan dari Kopwan umumnya belum berperan optimal dalam mendukung upaya pengembangan kegiatan ekonomi kerakyatan. Selain sebagian pinjaman acapkali dimanfaatkan untuk kegiatan yang sifatnya konsumtif, tidak jarang terjadi anggota Kopwan yang memperoleh pinjaman modal usaha mengalami proses pengikisan modal karena usaha yang ditekuni berjalan stagnan, bahkan mengalami kemunduran. Sejumlah informan menuturkan bahwa di tengah iklim persaingan usaha yang makin ketat, prospek perkembangan UMKM cenderung terbatas, bahkan tak kuat bertahan hidup ketika harus menghadapi iklim yang makin kompetitif dan serbuan produk impor yang murah.

Berikut sejumlah saran yang perlu diperhatikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kinerja Kopwan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi kendala keterbatasan modal, selain menggandalkan diri pada dukungan kucuran dana dari pemerintah, para pengurus Kopwan sebaiknya juga menjajagi sumber-sumber dana lain yang potensial, semisal dari program CSR, program *Community Development* dari berbagai BUMN dan lain-lain --termasuk dukungan dana swamandiri-- dari masyarakat yang menjadi anggota Kopwan agar dapat diperluass daya jangkau layanan Kopwan untuk memberi pinjaman modal usaha bagi anggotanya secara merata dan berkelanjutan.
2. Para pengurus Kopwan secara umum masih sangat membutuhkan pelatihan-pelatihan dan pendampingan yang berkaitan dengan perbaikan pengelolaan atau manajemen pengelolaan koperasi secara professional. Kopwan idealnya dikelola



secara sistematis, efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Manajemen yang profesional juga sekaligus dapat menjadi bekal kopwan bersaing dengan lembaga-lembaga sejenisnya. Di samping itu, Kopwan secara umum juga masih sangat membutuhkan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan usaha sehingga kopwan dapat meningkatkan kinerjanya dan memperbesar keuntungan bagi anggotanya. Pengembangan usaha untuk kopwan idealnya tidak saja dikaitkan dengan kebutuhan peran perempuan (*domestic*) tetapi juga idealnya dikaitkan dengan pengembangan potensi produktif anggota kopwan yang bermanfaat dalam memperkuat penyangga ekonomi keluarga sekaligus media bagi perempuan melakukan aktualisasi diri.

3. Ke depan, peran strategis Kopwan yang perlu dikembangkan, antara lain meliputi: (1) sebagai lembaga substitutif untuk bersaing, dan bahkan mengganti peran lembaga perkreditan informal yang acapkali merugikan masyarakat karena membebani mereka dengan suku bunga yang mencekik leher, (2) sebagai lembaga pendukung perkembangan kegiatan ekonomi kerakyatan, dan (3) sebagai wadah bagi upaya pemberdayaan peran perempuan. Ketiga peran utama Kopwan ini, perlu memperoleh perhatian khusus agar dapat dijamin konsistensi dan keterpaduan dalam proses perkembangan Kopwan di berbagai daerah.
4. Dalam proses pembinaan dan pendampingan yang diberikan kepada para pengurus Kopwan di berbagai daerah seyogianya tidak hanya pendampingan untuk kepentingan perbaikan administrasi dan manajemen lembaga, tetapi juga pendampingan dalam rangka mendorong dan memfasilitasi pengembangan usaha produktif dari para anggota Kopwan agar kegiatan usaha yang dikembangkan Kopwan tidak hanya dalam bentuk simpan-pinjam, melainkan bisa pula dikembangkan untuk berbagai kegiatan produktif yang lain.
5. Sesuai dengan isi Undang-Undang Koperasi yang terbaru, perkembangan koperasi ke depan --tak terkecuali Kopwan-- diharapkan mengacu pada pengembangan salah satu bidang, yaitu produksi, konsumsi, jasa pelayanan dan jasa simpan-pinjam. Mulai saat ini, untuk menjamin kontinuitas perkembangan Kopwan di Jawa Timur seyogianya mulai dikondisikan untuk memilih salah satu bidang pengembangan, dan segera dilakukan pelatihan bagi pengurus Kopwan sesuai dengan bidang pengembangan koperasi yang dipilih. Pelatihan ini perlu segera dilakukan untuk membantu proses persiapan pengembangan Kopwan yang lebih spesifik, sesuai dengan kompetensi dan pilihan pengurus Kopwan itu sendiri (\*).

## PRAKATA

Kopwan adalah salah satu lembaga sosial-ekonomi yang secara terencana didorong perkembangannya di Provinsi Jawa Timur dengan tujuan untuk memberi ruang bagi kiprah kaum perempuan dan sekaligus sebagai wadah untuk membantu kaum perempuan (anggota Kopwan) untuk memberdayakan usaha dan tingkat kesejahteraan mereka melalui penyaluran bantuan pinjaman modal usaha berbunga murah. Meski ada banyak kemajuan telah berhasil dicapai pasca dikembangkan Kopwan di berbagai daerah, tetapi secara objektif harus diakui masih ada banyak hal yang perlu dibenahi dan diperhatikan sehubungan dengan kinerja Kopwan di berbagai daerah.

Sebagai sebuah lembaga sosial-ekonomi yang bergerak di akar rumput, pendirian dan pengembangan Kopwan di berbagai daerah di Jawa Timur sebetulnya adalah sebuah langkah strategis. Namun demikian, dalam pelaksanaannya di lapangan sudah barang tentu masih ada banyak kendala yang dihadapi, bahkan berbagai bias yang menyebabkan tujuan pendirian Kopwan belum dapat tercapai secara optimal. Studi ini menemukan, meski pun kehadiran Kopwan terbukti memberikan berbagai manfaat, baik dalam membuka ruang beraktualisasi bagi perempuan maupun dalam rangka mendorong pengembangan kegiatan ekonomi kerakyatan. Tetapi, karena tidak didukung dana atau modal kerja yang memadai, maka yang terjadi di lapangan adalah ruang gerak dan luas cakupan kerja Kopwan Jatim umumnya menjadi sangat terbatas. Terlebih, dalam praktik tidak sekali-dua kali pihak pengurus harus berhadapan dengan situasi yang serba dilematis, terutama ketika harus memilih antara mendahulukan prinsip efisiensi pengelolaan ataukah prinsip efektivitas pencapaian tujuan.

Studi ini dapat selesai tepat waktu sudah barang tentu berkat dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada: (1) Rektor dan Ketua LPPM Universitas Airlangga yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk melaksanakan penelitian ini, (2) Dekan FISIP Unair atas dukungan yang telah diberikan, (3) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur yang telah membantu memberikan data yang kami butuhkan, dan (4) para pengurus dan

anggota Kopwan di Kabupaten Tuban dan MMalang yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan data yang kami butuhkan.

Kami berharap hasil studi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyusun program revitalisasi peran Kopwan dan program pemberdayaan perempuan di TJawa Timur.

Surabaya, Oktober 2013

Tim Peneliti

**DAFTAR ISI**

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
RINGKASAN.....	ii
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Perumusan Masalah.....	3
<b>BAB II</b> <b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>5</b>
1. Lembaga Perkreditan dan Masalah Permodalan.....	7
2. Pemberdayaan Perempuan.....	9
<b>BAB III</b> <b>TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....</b>	<b>11</b>
1. Tujuan.....	11
2. Manfaat.....	11
<b>BAB IV</b> <b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>13</b>
<b>BAB V</b> <b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>16</b>
1. Sejarah Berdirinya Kopwan di Jawa Timur.....	16
2. Profil Koperasi Wanita yang Menjadi Latar Studi.....	20
3. Pengelolaan/Manajemen Koperasi.....	24
4. Peran Kopwan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan.....	28
<b>BAB VI</b> <b>RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA.....</b>	<b>35</b>
<b>BAB VII</b> <b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>37</b>
1. Kesimpulan.....	38
2. Saran.....	40
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>44</b>
<b>LAMPIRAN:</b>	
1. Artikel Ilmiah.....	46
2. Personalia Penelitian dan Kualifikasinya.....	56



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Untuk memberi ruang dan meningkatkan potensi perempuan dalam aktivitas ekonomi dan sekaligus sebagai media bagi perempuan untuk beraktualisasi diri, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir telah memutuskan untuk memfasilitasi dan mendorong pengembangan koperasi yang khusus dikelola oleh perempuan, atau yang lazim disebut Koperasi Wanita (Kopwan). Meski di berbagai daerah disadari telah banyak lembaga keuangan mikro (LKM) yang eksis dan telah pula banyak melibatkan partisipasi kaum perempuan dalam pengelolaannya, namun dengan memastikan wadah yang lebih terlindungi secara hukum, yakni koperasi, diharapkan ruang gerak kaum perempuan dalam lembaga koperasi dan kiprah kaum perempuan dalam bidang ekonomi dapat lebih dipercepat dan diperluas.

Di tahun 2010, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mematok target pertambahan Kopwan sekitar 125% dari rencana sebelumnya 2.000 unit menjadi 4.250 unit, dengan menghadirkan satu koperasi di setiap kelurahan dan desa. Secara kelembagaan, kenapa pemerintah berkomitmen untuk mendorong pengembangan Kopwan, karena selama ini dari 19.405 koperasi yang ada di Jawa Timur, ternyata hanya 3% yang dikelola wanita. Padahal, secara umum tingkat kesehatan koperasi yang dikelola perempuan cenderung lebih baik dibandingkan koperasi lainnya. Dengan maksud untuk memberi kesempatan kaum perempuan beraktualisasi dan sekaligus memberi wadah bagi upaya pengembangan UMKM, di era pemerintahan dua periode Pakde Karwo-Gus Ipul karena itu salah satu program unggulannya adalah mengembangkan Kopwan di berbagai daerah. Setelah dipastikan menjadi pemenang Pemilu untuk kedua kalinya, Pakde Karwo-Gus Ipul telah memastikan bahwa keberadaan dan perkembangan Kopwan akan tetap diprioritaskan sebagai mitra kerja UMKM dan media bagi upaya pemberdayaan kaum perempuan.

Dalam Petunjuk Teknis Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro melalui Koperasi Wanita (2010) yang dikeluarkan Dinas Koperasi dan UKM Jatim disebutkan



secara garis besar tujuan pengembangan Kopwan adalah: Pertama, melalui koperasi, perempuan memiliki suatu wadah untuk mengelola dan memenuhi kebutuhan anggotanya, dalam hal ini perempuan itu sendiri. Kedua, melalui koperasi, perempuan dapat mewujudkan apa yang dicita-citakan, karena mereka tahu yang diinginkan dan memiliki kepentingan yang sama. Ketiga, melalui koperasi perempuan dapat menghasilkan sesuatu secara bersama-sama sehingga produktivitas akan meningkat. Keempat, melalui koperasi perempuan dapat meningkatkan taraf hidup keluarganya. Kelima, melalui koperasi perempuan memiliki akses lebih untuk mendapatkan fasilitas dan kemudahan.

Sebagai modal awal untuk memfasilitasi pengembangan Kopwan, Pemerintah Jawa Timur memberikan bantuan modal awal kepada setiap Kopwan sebesar 25 juta rupiah dari anggaran hibah APBD Jawa Timur. Dan, jika dalam perjalanannya terbukti berkembang akan diberi tambahan suntikan dana sebesar 25 juta rupiah. Sudah barang tentu, dengan telah diberikannya suntikan modal awal ini, pengelolaan Kopwan dalam perkembangan berikutnya diharapkan akan dapat berjalan dengan baik, tertib dan lancar. Di Provinsi Jawa Timur, secara keseluruhan pembentukan Kopwan kini telah mencapai minimal 8.750 unit. Pengembangan Kopwan ini adalah bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memberdayakan para pengusaha mikro sekaligus memerangi praktik *bank thithil* (penyaluran dana pinjaman dengan bunga tinggi).

Menurut hasil evaluasi yang dilakukan Laboratorium Pengembangan Ekonomi Pembangunan (LPEP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unair (2011), secara umum keberadaan Kopwan di berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur relatif mengalami banyak kemajuan. Dari indikator jumlah rata-rata simpanan wajib, jika pada tahun 2009 hanya sebesar Rp.1.358.152,54, maka pada tahun 2010 terjadi peningkatan rata-rata simpanan wajib sebesar Rp.1.417.864,28 dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2011, penjumlahan sampai bulan agustus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, jumlah rata-rata dari simpanan wajib sebesar Rp.2.734.892,56. Pada tahun 2011, simpanan pokok yang berhasil dikumpulkan oleh koperasi perempuan sebesar Rp.5.324.387.

Lebih dari sekadar usaha simpan-pinjam, kehadiran Kopwan selain diharapkan dapat dapat menjadi salah satu wadah yang sangat strategis untuk meningkatkan

kesejahteraan keluarga anggota Kopwan, dan media aktualisasi diri perempuan, sebagai salah satu lembaga keuangan mikro yang ada di tingkat bawah, kehadiran Kopwan juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi kerakyatan, mampu mengikis keberadaan rentenir, *bank thithil* dan tengkulak yang seringkali menetapkan suku bunga yang mencekik leher, dan sekaligus ikut berperan aktif dalam upaya penanganan kemiskinan di masyarakat sekitarnya.

Berbeda dengan lembaga perbankan formal yang memiliki pranata dan aturan yang ketat, sebagai bagian dari Lembaga Keuangan Mikro, kehadiran Kopwan umumnya dikelola secara lebih fleksibel dan berbasis pada pendekatan yang sifatnya kekeluargaan, tanpa harus terjebak pada bias dan pertimbangan subyektif yang akan berdampak kontra-produktif. Di masing-masing daerah, tidak menutup kemungkinan cara dan model pengelolaan Kopwan yang diterapkan pengurus berbeda satu dengan yang lain. Tetapi, terlepas apapun model pengelolaan yang diterapkan, tentu yang diharapkan keberadaan dan eksistensi Kopwan tidak hanya memikirkan aspek efisiensi pengelolaannya saja – dalam arti hanya mementingkan bagaimana menjaga agar kasus tunggakan angsuran anggota tidak terjadi--, tetapi yang tak kalah penting adalah bagaimana memastikan kehadiran Kopwan juga mampu menjalankan peran yang efektif sebagai bagian dari Lembaga Keuangan Mikro yang bertanggungjawab mendorong pengembangan usaha ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan anggotanya.

Kajian sebagaimana dilaporkan selain bermaksud memetakan situasi problematik yang dihadapi Kopwan dalam pengelolaan usahanya, juga sekaligus bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas management pengelolaan Kopwan agar dapat maju dan mandiri.

## **2. Perumusan Masalah**

Secara garis besar, fokus masalah yang dicoba dikaji dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Kendala dan situasi problematik apa sajakah yang dihadapi Kopwan dalam pengembangan dan pengelolaan modal usahanya?

2. **Bagaimana gambaran tentang mekanisme yang dikembangkan Kopwan di Jawa Timur dalam manajemen pengelolaan keuangan, aspek administrasi, produksi dan aspek pemasarannya?**
3. **Sejauhmana keberadaan Kopwan di Jawa Timur mampu berperan dalam memenuhi kebutuhan sosial anggotanya, meningkatkan tingkat kesejahteraan anggota serta masyarakat di sekitarnya? Termasuk di sini, sejauh mana kehadiran Kopwan telah berperan sebagai media aktualisasi diri peran dan potensi perempuan?**
4. **Sejauhmana kehadiran Kopwan di Jawa Timur telah mampu mendorong pertumbuhan usaha ekonomi kerakyatan di wilayahnya?**

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Koperasi sesungguhnya adalah bagian dari lembaga keuangan mikro di masyarakat yang tumbuh dan memiliki akar kultural yang sesuai dengan karakteristik budaya bangsa Indonesia. Koperasi pada dasarnya adalah kegiatan bisnis yang mendayagunakan potensi sosial-ekonomi anggotanya. Potensi-potensi ekonomi anggota ini secara kolektif akan membentuk kekuatan yang besar sehingga bisa dicapai semacam skala ekonomis yang lebih layak dalam berusaha.

Dari beberapa hasil studi kasus tentang koperasi memperlihatkan bahwa keberadaan koperasi tidak saja menguntungkan pada anggota koperasi, tetapi juga telah berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik untuk komunitas di mana koperasi tersebut berada. Keberadaan dan perkembangan koperasi khususnya koperasi yang dikelola perempuan di Indonesia cukup menarik perhatian pemerintah maupun para pembina karena koperasi-koperasi tersebut menunjukkan perkembangan kinerja yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari sisi organisasi maupun usaha (Hakim & Panggabean, 2006).

Keberadaan dan keberhasilan koperasi tidak dapat dilepaskan dari konsep kepercayaan (trust) dari anggota kepada Pengurus dan sebaliknya. Dalam hal ini ada prinsip hubungan timbal balik dalam arti materi atau inmateri, juga menunjuk pada hubungan pertukaran yang sebetulnya terbentang mulai dari yang paling tidak jelas pengukurannya sampai dengan jelas pengukurannya, mulai dari yang langsung sampai ke yang tidak langsung (Lawang R, 2006). Dalam hal ini kepercayaan antara koperasi dengan anggotanya terbangun jika kedua belah pihak saling memenuhi ekspektasi dari keduanya. Anggota akan percaya terhadap koperasi jika koperasi mampu memenuhi ekspektasi kebutuhan anggotanya melalui mekanisme yang memenuhi prinsip-prinsip perkoperasian yang menjadi kesepakatan. Dengan kata lain bahwa koperasi akan dipercaya oleh anggotanya jika harapan-harapan anggotanya dapat dipenuhi tanpa

membedakan apa pun, termasuk perbedaan jenis kelamin. Sebaliknya koperasi ada, bertahan dan berkembang jika anggotanya memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Menurut Soebyakto (2005), di Indonesia pembangunan koperasi selama ini dikembangkan dan dirancang melewati 3 (tiga) tahapan utama. Pertama, tahap ofisialisasi, yakni tahap "penumbuhan kesadaran" pada penduduk Indonesia tentang pentingnya berusaha dan keluar dari lingkaran kemiskinan di mana pemerintah akan berusaha membantu dengan menyalurkan sumber-sumber ekonomi (modal, kemampuan, dan sebagainya) sehingga mereka bisa menjadi potensi ekonomi untuk koperasi. Kedua, tahap deofisialisasi, yakni tahap di mana kesadaran masyarakat telah tumbuh dan semangat koperasi sudah terbentuk, maka pemerintah akan mulai mundur dari koperasi pada tahap ini. Ketiga, tahap otonomi, yakni tahap yang ditandai dengan munculnya kemandirian koperasi Indonesia, di mana keterlibatan pemerintah benar-benar telah keluar sama sekali, karena koperasi yang ada telah mampu maju dan mandiri tanpa harus tergantung kepada intervensi atau bantuan dari pemerintah.

Untuk saat ini, meski perkembangan koperasi di Indonesia sudah tergolong cukup maju dan meluas, namun harus diakui eksistensi koperasi tidak mungkin berdiri sendiri tanpa hubungan dengan pihak lain (usaha negara maupun swasta). Secara internal, koperasi sangat membutuhkan kerjasama dengan pihak-pihak lain itu karena keterbatasan kemampuan dalam hal manajemen, pengelolaan sumber daya, serta sumber-sumber kemampuan lainnya (seperti modal dan teknologi). Secara eksternal, globalisasi sudah terlanjur berjalan, sehingga koperasi perlu menjalin kemitraan dengan pemerintah (BUMN) dan swasta, sehingga dalam berusaha "persaingan bebas yang sehat" antar pelaku ekonomi ini bisa terjamin.

Dari hasil pemetaan yang dilakukan para ahli, dewasa ini terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan koperasi, antara lain sebagai berikut: rendahnya produktifitas diakibatkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia koperasi, khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi dan pemasaran, serta rendahnya kompetensi kewirausahaan koperasi, terbatasnya akses koperasi kepada sumber daya produktif terutama terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pemasaran; masih rendahnya kinerja; serta kurang kondusifnya iklim usaha.



Bagi kaum perempuan miskin, kehadiran koperasi memiliki peran yang positif. Kehadiran dan perkembangan koperasi, bukan saja terbukti menjadi media bagi perempuan untuk mengembangkan potensi ekonominya, tetapi juga sekaligus menjadi media sosial bagi perempuan untuk ruang beraktualisasi diri. Koperasi menciptakan peluang bagi perempuan untuk membantu diri sendiri. Lebih dari 800 juta orang di seluruh dunia sudah menjadi anggota koperasi. Meskipun koperasi lebih memberi fokus untuk memenuhi kebutuhan lokal para anggotanya, mereka juga bekerjasama dan terkait secara global. Mereka sama-sama mendukung dan mempraktekkan nilai maupun prinsip yang terkandung dalam ICIS (Pernyataan Internasional tentang Jatidiri Koperasi). Basis demokrasi dan kombinasi tujuan sosial ekonomi yang unik menempatkan koperasi sebagai lembaga ideal yang berperan untuk meningkatkan kelayakan globalisasi. Sesuatu yang telah mereka praktekkan selama beberapa generasi. Dalam banyak hal koperasi adalah cermin dan lebih menampilkan wajah kemanusiaan dari globalisasi yang mementingkan uang dan modal semata-mata (Ismangil, 2007). Bukan tidak mungkin untuk menghadapi era persaingan pasar bebas pengembangan peran perempuan melalui koperasi perempuan (kopwan), akan menjadi salah satu titik balik yang menjadikan era globalisasi sebagai pembukaan kesempatan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menunjukkan eksistensi dalam kancah perekonomian dunia.

## 1. Lembaga Perkreditan dan Masalah Permodalan

Di kalangan masyarakat miskin, salah satu ciri yang sudah lama dikenali para ahli adalah kehausan masyarakat desa terhadap kredit. Kredit diperlukan karena penghasilan keluarga biasanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, lebih-lebih untuk memenuhi berbagai kebutuhan sosial atau kebutuhan darurat lainnya. Keadaan "defisit" yang senantiasa berjalan inilah yang mengakibatkan penduduk desa terlibat sistem ijon (Mubyarto dan Kartodirdjo, 1988: 35). Bagi masyarakat miskin, kredit merupakan sarana untuk menciptakan pendapatan melalui bekerja dan berusaha dalam lingkungan ekonomi yang terbatas. Kredit yang tepat, murah, dan mudah yang dikelola berdasar adat dan budaya setempat merupakan salah satu sarana penting yang amat membantu melancarkan kegiatan perekonomian pedesaan. Ringkasnya, fungsi kredit adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang tergojong miskin.

Meski pun demikian tidaklah dapat dikatakan bahwa tersedianya kredit akan selalu bisa memecahkan semua masalah petani. Bisa saja terjadi diperolehnya kredit justru akan merupakan titik awal dari macam-macam masalah lain dan kehancuran usaha yang ditekuni masyarakat miskin (Mubyarto, 1985: 429). Sebabnya salah satunya adalah berpangkal dari kesalahan masyarakat miskin itu sendiri yang kadang hidup boros. Tetapi, di sisi lain, kesalahan juga bisa bersumber dari tekanan-tekanan kebutuhan ekonomi yang memang tidak bisa dielakkan. Kerentanan dan kemiskinan yang diderita masyarakat miskin, sering menyebabkan mereka terpaksa harus mengalihkan dan memanfaatkan kredit yang diperoleh bukan untuk kegiatan produktif, tetapi untuk kegiatan yang sifatnya konsumtif (Chambers, 1987). Dalam penelitian ini, yang dimaksud kredit produktif adalah kredit yang pemanfaatannya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup nasabah. Sedangkan yang dimaksud kredit konsumtif adalah kredit yang pemanfaatannya hanya dimaksudkan untuk sekedar bertahan hidup (Djojohadikusumo, 1988).

Dari segi bisnis, kredit hanyalah merupakan salah satu faktor saja dari kombinasi faktor-faktor produksi yang harus secara bersama-sama mensukseskan suatu usaha. Ada banyak contoh usaha yang berhasil tanpa dukungan kredit, atau banyak usaha tidak berkembang meskipun memperoleh bantuan kredit (Suyanto, 1992). Kegagalan yang sering terjadi dalam memanfaatkan kredit biasanya disebabkan kegagalan dalam pemasaran hasil produksi, baik karena semata-mata kalah dalam persaingan dengan pengusaha atau petani lain yang lebih kuat, maupun karena sebab-sebab obyektif seperti mutu hasil yang rendah dan sebagainya. Memang harus diakui bahwa kelemahan dalam pemasaran justru karena aspek pemasaran ini biasanya dianggap tidak sukar, jadi diremehkan (Soekartawi, 1989).

Kesulitan pelaksanaan pemberian kredit secara efektif biasanya mengalami beberapa hambatan, misalnya karena amat beragamnya kelompok sasaran yang hendak dijangkau, dan kesukaran mengkompromikan kriteria efisiensi dan efektifitas kredit. Berdasarkan pengalaman di negara sedang berkembang, kredit lebih mudah dinikmati oleh petani menengah dan petani besar (Kasryno, 1984). Padahal jelas yang lebih memerlukan adalah petani-petani kecil yang tidak mampu membeli sarana produksi pertanian secara tunai.

Di Provinsi Jawa Timur sendiri, salah satu bentuk pemberian modal usaha untuk memberdayakan masyarakat, khususnya kaum perempuan adalah melalui program pengembangan Kopwan. Dibandingkan program-program pembangunan yang lain, program pengembangan Kopwan ini secara konseptual menawarkan sesuatu yang relatif baru. Dengan mempercayakan pengelolaan koperasi kepada perempuan, diharapkan hasilnya akan dapat lebih baik, efisien dan efektif, karena banyak kajian telah membuktikan bahwa kaum perempuan sesungguhnya memiliki potensi kewirausahaan yang kenyal dan kreatif dalam menyasati tekanan krisis. Melalui Kopwan, lembaga ini bukan saja diharapkan akan lancar dalam mengelola bantuan kredit dan usaha simpan-pinjam, tetapi lebih jauh kehadiran Kopwan diharapkan juga akan dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya, merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi kerakyatan dan bahkan berperan positif dalam upaya pemberantasan kemiskinan di masyarakat.

## 2. Pemberdayaan Perempuan

Dalam kajian gender, kepentingan perempuan untuk memperbaiki posisi/statusnya dalam masyarakat menjadi semakin terganggu jika kesulitan ekonomi menekan mereka. Sebab itu mengintegrasikan perspektif gender dalam program pembangunan menjadi keharusan dengan alasan obyektif yaitu perbaikan perekonomian (*economic performance*) sekaligus alasan subyektif, yaitu demi keadilan ekonomi dan kesetaraan gender. Adalah sebuah kewajiban bagi pemerintah dan khusus bagi pengambil kebijakan untuk secara sengaja melakukan tindakan khusus (*special measures*) dengan mempertimbangkan kondisi spesifik perempuan yang ditujukan untuk memperbaiki statusnya.

Kenapa perempuan perlu dipertimbangkan secara khusus dalam pembangunan? Bila dalam keadaan normal saja perempuan telah terperangkap dalam situasi marginal (seperti buta aksara, pendidikan rendah dan dalam budaya diam) yang merupakan cerminan dari kemiskinan sosial, maka dalam masyarakat yang mengutamakan pembangunan industri dengan teknologi tinggi jelas hal itu akan makin memperparah kondisi tersebut.

Secara lebih tegas Mosser (1991) mengemukakan bahwa kondisi khusus perempuan yang buta aksara, teknologi, dan tidak biasa bicara meskipun untuk dirinya

sendiri ini membutuhkan suatu pendekatan yang mengadopsi *community development* di atas. Mosser (1991) memberikan jalan keluar dengan temuannya tentang kebutuhan spesifik perempuan yang dirumuskan dalam kebutuhan praktis gender (untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari) dan kebutuhan strategis gender (untuk meningkatkan statusnya dalam masyarakat). Klasifikasi tersebut didasarkan pada temuan sebagai kaitan dengan adanya peran majemuk perempuan yaitu peran reproduksi (berhubungan dengan peran tradisional di sektor domestik) peran produktif (peran ekonomi di sektor publik), dan peran sosial (peran komunitas).

Program pembangunan yang dikembangkan di daerah manapun, tak terkecuali di Provinsi Jawa Timur mau tidak mau harus mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan spesifik perempuan. Hal ini berarti bahwa desain atau rencana program pembangunan khususnya untuk perempuan harus memenuhi kebutuhan spesifik perempuan baik kebutuhan praktis maupun strategis gender. Meskipun orientasi utama dalam program pembangunan pemberdayaan perempuan adalah pemenuhan kebutuhan strategis guna mencapai terwujudnya kesetaraan gender untuk jangka panjang, namun bukan berarti pemenuhan kebutuhan praktis tidak penting, sebab pemenuhan kebutuhan praktis justru sebagai dasar dan sarana terpenuhinya kebutuhan strategis gender.

Meski ada banyak program lain yang tetap perlu dikembangkan untuk memfasilitasi upaya pemberdayaan perempuan, tetapi apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang secara khusus mendorong pengembangan Koperasi Wanita harus diakui merupakan satu langkah maju. Di bidang kewirausahaan, banyak kajian telah membuktikan bahwa secara peran perempuan sebetulnya cukup menonjol, dan bahkan kinerja mereka cenderung lebih baik daripada laki-laki (lihat: Jurnal Analisis Sosial Vol. 8, No. 2 Oktober 2003). Di sektor perdagangan tradisional, di sektor informal, dan industri kecil, peran perempuan seringkali terbukti sangat strategis, baik sebagai tenaga kerja produksi, pemasaran atau juga di bidang pengelolaannya.

Dengan memberikan perhatian dan kesempatan kepada perempuan untuk mengelola koperasi, bagaimanapun hal ini adalah sebuah harapan dan kesempatan baru bagi perempuan untuk beraktualisasi diri untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki (\*).

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **1. Tujuan**

Secara garis besar, tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah:

1. Memetakan situasi problematik, kondisi dan karakteristik Kopwan di Jawa Timur.
2. Memperoleh data tentang management pengelolaan Kopwan di Jawa Timur, khususnya dalam pengelolaan dana hibah dari APBD Provinsi Jawa Timur dan mengetahui kendala-kendala yang menghambat.
3. Mengkaji peran Kopwan dalam mendorong pengembangan usaha ekonomi kerakyatan dan penanganan kemiskinan.
4. Menyusun strategi pengembangan management pengelolaan Kopwan yang efektif dalam rangka mewujudkan Kopwan yang mandiri, serta mampu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat di sekitarnya.

#### **2. Manfaat**

Hasil kajian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan masukan berupa rekomendasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang strategi pengembangan dan pengelolaan Kopwan yang lebih efektif dalam mewujudkan Kopwan yang mandiri serta mampu meningkatkan kesejahteraan anggota dan aktivitas UMKM yang ditekuni masyarakat di sekitarnya, khususnya kaum perempuan.

Studi sebagaimana dilaporkan penting dan mendesak dilakukan karena sejumlah alasan sebagai berikut. Pertama, karena sebagai program baru, upaya pengembangan Kopwan di Jawa Timur tentu membutuhkan evaluasi dan arah perbaikan yang benar-benar tepat. Kedua, karena hasil kajian ini akan dapat dijadikan acuan sekaligus pelajaran untuk mengetahui situasi problematik seperti apakah yang dihadapi Kopwan di Jawa Timur dalam upaya pengembangan dirinya sebagai bagian dari Lembaga Keuangan Mikro. Ketiga, karena rekomendasi yang dihasilkan dari kajian ini akan dapat dijadikan acuan untuk memastikan agar pengucuran dana APBD bagi pemberdayaan perempuan



dan pengembangan koperasi benar-benar terlaksana dan mencapai sasaran sebagaimana diinginkan (\*).



## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

Kajian sebagaimana dilaporkan adalah gabungan dari kegiatan analisis data sekunder dan analisis data primer yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam. Selain melakukan pemetaan terhadap situasi problematik dan isu-isu utama yang timbul dalam upaya pengembangan Kopwan di Jawa Timur, hasil akhir dari kajian yang dilakukan diharapkan berupa rekomendasi taktis dan strategis untuk dasar acuan pengembangan Kopwan sekaligus upaya pemberdayaan kaum perempuan yang benar-benar profesional dan efektif.

Lokasi kajian, ditetapkan di dua daerah, yaitu Kabupaten Tuban dan Kabupaten Malang. Lokasi penelitian di Kabupaten Tuban, ditetapkan di tiga wilayah Kecamatan, yaitu: (1) Kecamatan Tuban; (2) Kecamatan Kerek; dan (3) Kecamatan Merak Urak. Kecamatan Tuban, tepatnya di Kelurahan Latsari yang terletak di Kota Tuban, merepresentasikan daerah perkotaan, Kecamatan Kerek, diasumsikan menjadi representasi wilayah pedesaan, dan memang di wilayah ini sebagian besar masyarakatnya bermatapencarian sebagai petani dan pengrajin Batik Gedhok Tuban, dan Kecamatan Merak Urak, menjadi representasi wilayah transisi, yaitu wilayah yang berada di perbatasan Kota Tuban dengan wilayah pedesaan yang di dominasi oleh tanah ladang dan lahan pertanian.

Sedangkan di Kabupaten Malang, lokasi penelitian dilakukan di dua kecamatan, yaitu: (1) Kecamatan Singosari dan (2) Kecamatan Karangploso. Pemilihan kedua kecamatan tersebut didasarkan atas keberadaan dua buah koperasi wanita yang sudah lebih dulu ada, sebelum Pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan program Pendirian dan pengucuran dana bantuan untuk Koperasi Wanita (Kopwan) di seluruh kelurahan/desa di Jawa Timur. Koperasi Wanita-Wanita Mandiri di Kecamatan Karangploso, dan Koperasi Wanita-Kartini Mandiri yang ada di Kecamatan Singosari itu diambil sebagai kasus dalam penelitian ini karena kedua koperasi wanita itu mampu bertahan cukup lama, dan pendiriannya tanpa campur tangan pemerintah, sehingga

pengalaman yang di miliki para pengurus di kedua koperasi itu dapat menjadi pembandingan yang cukup bermakna bagi pengembangan koperasi-koperasi wanita yang ada di berbagai desa/kelurahan yang tersebar di seluruh wilayah di Jawa Timur yang dibentuk pemerintah.

Di masing-masing kabupaten, sejumlah nara sumber atau informan yang terlibat langsung sebagai pengurus dalam pengelolaan Kopwan (Ketua, Bendahara dan Sekretaris) diwawancarai secara mendalam (*in depth*). Wawancara kepada pengurus Kopwan dilakukan dengan dipandu *interview guide* yang telah dipersiapkan sebelumnya. Fokus atau ruang lingkup dari kajian yang dilakukan dibatasi pada berbagai persoalan yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, kelembagaan, aspek sumber daya manusia, administrasi dan keuangan, produksi dan pemasaran Kopwan di Jawa Timur.

Seperangkat instrumen penelitian yang berfungsi untuk mendapatkan sejumlah data dan informasi penting bagi studi ini. Adapun instrumen yang telah disusun digunakan untuk mendapatkan data primer maupun sekunder. Untuk data primer disusun dua buah pedoman wawancara (*guide interview*) yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi secara langsung dari para informan, yaitu: Ketua atau pengurus koperasi; dan anggota.

Pedoman wawancara yang disusun pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang: (a) Pengelolaan atau manajemen koperasi; (b) sumberdaya manusia yang mengelola koperasi; (c) administrasi atau pembukuan aktivitas kegiatan koperasi; (d) permodalan dan pengembangannya; (e) kegiatan utama koperasi; (f) analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, hambatan atau ancaman, dan peluang untuk berkembang). Sedangkan untuk anggota koperasi, beberapa hal yang dicari informasinya adalah: (a) awal-mula menjadi anggota koperasi; (b) usaha yang sedang ditekuni saat menjadi anggota koperasi, termasuk omzet per bulan dan keuntungan yang diperoleh dari usaha yang ditekuninya; (c) alasan memilih menjadi anggota koperasi; (d) keuntungan atau kerugian setelah menjadi anggota koperasi; dan (e) kendala/hambatan/persoalan yang dialami selama menjadi anggota koperasi.

Wawancara kepada pengurus Kopwan akan dilakukan dengan dipandu *interview guide* yang telah dipersiapkan sebelumnya. Fokus atau ruang lingkup dari kajian yang dilakukan dibatasi pada berbagai persoalan yang berkaitan dengan aspek pengelolaan,

kelembagaan, aspek sumber daya manusia, administrasi dan keuangan, produksi dan pemasaran Kopwan di Jawa Timur. Persoalan utama yang digali dari para informan, khususnya pengurus Kopwan Jatim adalah kendala-kendala atau problema yang mereka hadapi di tahap awal proses pengembangan Kopwan, dan bagaimana mekanisme pengelolaan modal kerja yang dikembangkan selama ini.

Sementara itu, wawancara dengan anggota Kopwan, yakni kaum perempuan miskin yang pernah memperoleh pinjaman modal usaha dari Kopwan difokuskan pada riwayat perkembangan usaha, kendala-kendala yang mereka alami dalam upaya pengembangan usaha yang ditekuni, dan sejauhmana modal dari Kopwan terbukti fungsional mendukung upaya pengembangan usaha mereka.

Pada bagian akhir kajian ini, ada dua hal utama yang dikemukakan, yaitu: (1) sejumlah isu prioritas yang muncul di balik upaya pengembangan Kopwan di Jawa Timur; dan (2) sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan keberdayaan kaum perempuan, dan untuk meningkatkan efektivitas serta upaya pengembangan Kopwan di Jawa Timur di masa yang akan datang (\*).

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Sejarah Berdirinya Kopwan di Jawa Timur

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur,<sup>1</sup> berdirinya koperasi wanita (kopwan) di seluruh wilayah Kelurahan/Desa di Jawa Timur, dimulai pada tahun 2009. Pada awal didirikan kopwan pada Oktober tahun 2009 itu, telah terserap dana sebesar Rp. 106,41 Milyar untuk memfasilitasi pembentukan 3.750 Koperasi wanita di 3.750 desa atau kelurahan di Jatim. Di tiap kopwan diberikan modal awal Rp. 25 juta Rupiah yang dana dukungannya diambil dari APBD Prov Jatim.

Tahun 2010, Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mengucurkan dana sebesar 125.346 Milyar dan dilanjutkan pada P-APBD yang dianggarkan untuk pemenuhan pendirian 506 kopwan se Jatim. sehingga pada tahun 2010 di setiap desa dan kelurahan telah terbentuk satu kopwan yang berfungsi sebagai lembaga keuangan Mikro tingkat desa/kelurahan. Dari evaluasi kinerja 3.750 Kopwan yang telah dilaksanakan pada bulan Nopember 2010, secara umum menunjukkan *trend* naik. Dalam kurun waktu lebih kurang satu tahun sejak badan hukum didirikan dari sisi anggota Kopwan yang semula berjumlah 75.000 orang telah terjadi peningkatan menjadi 156.412 orang atau 108,55 persen. Dari 3.750 Kopwan berhasil menghimpun simpanan pokok dan simpanan wajib anggota sebesar Rp. 10,9 Milyar, berdasar bantuan permodalan dari Pemprov Jatim sebesar Rp. 93,75 M, saat ini volume pemberian pinjaman telah meningkat menjadi sebesar Rp. 144.548.733.080 dengan perputaran modal rata-rata 1,54 kali dari sisa hasil usaha sebesar 6.127.561.797. Hal ini menunjukkan geliat ekonomi di desa dan kelurahan dengan perputaran dana untuk kegiatan yang bersifat produktif.

Tujuan dari didirikannya koperasi wanita di setiap kelurahan/desa di seluruh wilayah di Propinsi Jawa Timur adalah agar kaum perempuan lebih berdaya. Kopwan

---

<sup>1</sup>Sumber: <http://bappeda.jatimprov.go.id/2011/04/19/hj-nina-soekarwo-dorong-wanita-jadi-penggerak-ekonomi/>

pun diharapkan mampu menjadi pelopor organisasi wanita yang berperan aktif dalam pelaksanaan program pembangunan di Jawa Timur. Peran aktif perempuan dapat diimplementasikan dengan penguatan ekonomi keluarga, yang salah satu kegiatannya menciptakan lapangan pekerjaan. Program ini mendapatkan pendampingan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.

Tabel 1: Kecamatan, Desa/Kelurahan di Kabupaten Tuban tahun 2011

KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	LETAK IBUKOTA KECAMATAN
1. Kenduruan	9	Sidomukti
2. Bangilan	14	Bangilan
3. Senori	12	Sendang
4. Singgahan	12	Mulyagung
5. Montong	13	Montongsekar
6. Parengan	18	Parengbatu
7. Soko	23	Sokosari
8. Rengel	16	Rengel
9. Grabagan	11	Grabagan
10. Plumpang	18	Plumpang
11. Widang	16	Widang
12. Palang	18	Glodok
13. Semanding	15	Bejagung
14. Tuban	14	Latsari
15. Jenu	17	Beji
16. Merakurak	19	Sambonggede
17. Kerek	17	Margomulyo
18. Tambakboyo	18	Sobontoro
19. Jatirogo	18	Watsogo
20. Bancar	24	Banjarejo
Jumlah	311	

Sumber: Kabupaten Tuban Dalam Angka 2012 (Bappeda)

Sebanyak 8.506 Kopwan dipantau terus kegiatannya. Tahun 2011, seribu Kopwan yang pengelolaan administrasi dan perputaran keuangannya dinilai baik akan mendapatkan dana tambahan sebesar Rp. 25 juta/Kopwan. Bagi Kopwan yang dinilai gagal akan terus diberikan bimbingan dan pembinaan, agar kegiatannya memberikan manfaat bagi masyarakat banyak. Keberadaan kopwan ini sesungguhnya dapat menyumbang angka pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Berdasarkan data yang ada, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2010 mencapai 6,67 persen. Dengan

peningkatan pemberdayaan Koperasi dan UKM, maka dapat menyumbang PDRB sebesar 53,4 persen.

**Tabel 2: Kecamatan, Desa/Kelurahan di Kabupaten Malang tahun 2011**

<b>KECAMATAN</b>	<b>JUMLAH DESA/KELURAHAN</b>
1. Donomulyo	10
2. Kalipare	9
3. Pagak	8
4. Bantur	10
5. Gedangan	8
6. Sumber Manjing	15
7. Dampit	12
8. Tirtoyudo	13
9. Ampelgading	13
10. Poncokusumo	17
11. Wajak	13
12. Turen	17
13. Bululawang	14
14. Gondanglegi	14
15. Pagelaran	10
16. Kapanjen	18
17. Sumberpucung	7
18. Kromengan	7
19. Ngajum	9
20. Wonosari	8
21. Wagir	12
22. Pakisaji	12
23. Tajinan	12
24. Tumpang	15
25. Pakis	15
26. Jabung	15
27. Lawang	12
28. Singosari	17
29. Karangploso	9
30. Dau	10
31. Pujon	10
32. Ngantang	13
33. Kesemban	6
<b>Jumlah</b>	<b>390</b>

Sumber: Kabupaten Malang dalam Angka 2012 (Bappeda)

Berdasarkan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengenai pendirian koperasi wanita di Wilayah Jawa Timur, maka dapat dipastikan bahwa di Kabupaten Tuban memiliki 311 koperasi wanita yang tersebar di setiap kelurahan atau desa. Berikut ini adalah data Kecamatan, Desa/Kelurahan di Kabupaten Tuban.

Sedangkan Koperasi Wanita di Kabupaten Malang ada sebanyak 398 unit, di mana 390 diantaranya adalah bentukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang tersebar di setiap kelurahan atau desa, sedangkan 8 koperasi wanita lainnya, telah lebih dulu ada sebelum Pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan kebijakan pembentukan koperasi wanita di seluruh kelurahan/desa di Jawa Timur.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Menengah (UMKM) Kabupaten Malang, Bambang Sumantri<sup>2</sup>, diketahui bahwa sebanyak 39 dari 390 koperasi wanita yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di Kabupaten Malang, dalam kondisi memprihatinkan, sehingga masuk kategori rehabilitasi. Penyebabnya adalah suntikan dana pada saat pendirian koperasi sebesar Rp 25.000.000 untuk modal simpan pinjam, pengembaliannya tidak lancar, unit usaha yang dijalankan juga tidak berjalan, bahkan kelembagaannya juga kurang solid. Memang secara kelembagaan, ke-39 kopwan itu masih ada, namun untuk mengaktifkan kembali, perlu dilakukan penanganan serius, mulai dari pembinaan pengurus, penataan lembaga hingga dorongan untuk menambah permodalan. Selain 39 kopwan yang masuk kategori rehabilitasi, ada pula 20 kopwan yang masuk kategori stabilisasi atau berkembang, karena kopwan tersebut sudah eksis dan tanpa ada campur tangan lagi dari pemerintah. Sementara ratusan kopwan lainnya dalam kategori konsolidasi, artinya kemandirian kopwan sudah baik, namun masih perlu pembinaan dan bimbingan dari pemerintah.

Memperhatikan berbagai persoalan yang dialami oleh pengurus koperasi wanita yang baru berdiri, baik di Kabupaten Tuban maupun di Kabupaten Malang, maka perlu digali lebih dalam tentang berbagai hal yang dapat menjadi penghambat maupun pendorong eksistensi koperasi wanita yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pada periode tahun 2009-2010. Data yang didapat dari hasil studi ini dikelompokkan menjadi beberapa subtopik yaitu: Pengelolaan atau manajemen koperasi, termasuk masalah administrasi kegiatan koperasi; kegiatan utama koperasi; sumberdaya manusia yang mengelola koperasi; permodalan dan pengembangannya; serta analisis tentang kekuatan, kelemahan, hambatan atau ancaman, dan peluang koperasi wanita

<sup>2</sup> Sebanyak 39 Koperasi Wanita Kabupaten Malang Memprihatinkan (diakses dari <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/113334/39-koperasi-wanita-kabupaten-malang-memprihatinkan>, 03 Jul 2013 17:32:15) Ekonomi | Penulis : Endang Sukarelawati, Antara Jatim



untuk berkembang di masa yang akan datang. Namun, sebelum membahas dinamika keberlangsungan hidup koperasi wanita yang terpilih sebagai kasus untuk studi ini, terlebih dahulu dipaparkan secara ringkas profil masing-masing koperasi wanita.

## **2. Profil Koperasi Wanita yang Menjadi Latar Studi**

### **2.1. Koperasi Wanita di Kabupaten Tuban**

#### **2.1.1. Koperasi Wanita (Kopwan) Annisa**

Koperasi yang terletak di Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban ini, didirikan pada tanggal 19 Februari 2010. Cikal-bakal pembentukannya dimulai setelah adanya informasi dari Pengurus Muslimat NU (salah satu organisasi wanita di bawah Organisasi Massa Islam Nahdlatul Ulama), di tiap-tiap ranting atau cabang di Kecamatan Tuban, yang menghimbau kepada para anggotanya untuk berlomba-lomba membuat proposal pendirian koperasi wanita. Proposal tersebut ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Tuban, yang kemudian diseleksi oleh Dinas Koperasi Kabupaten Tuban dan jika dianggap layak dan terpilih, koperasi wanita tersebut dapat didanai kegiatannya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Melalui tahap seleksi, akhirnya Kopwan Annisa terpilih mendapatkan jatah pendanaan kegiatan Rp 25.000.000 dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Bidang usaha yang dipilih Kopwan Annisa ini adalah, koperasi simpan-pinjam. Pengurus aktif di kopwan ini seluruhnya berjumlah tiga orang, terdiri dari: ketua, bendahara, dan sekretaris. Sedangkan pengawas berjumlah dua orang. Pengurus dan pengawas semuanya adalah para ibu yang masih aktif dalam organisasi Fatayat NU. Pada awal pendiriannya, jumlah anggota Kopwan Annisa seluruhnya ada 20 orang, dan kesemuanya adalah para anggota muslimat. Namun dalam perkembangannya, anggota Kopwan Annisa tidak hanya para ibu yang aktif di organisasi Muslimat, tetapi juga berasal dari berbagai ibu kalangan umum.

Hingga pertengahan tahun 2013, jumlah anggota Kopwan Annisa sudah mencapai sekitar 60 orang, dan latar belakang pekerjaan anggotanya cukup bervariasi, mulai dari ibu rumah tangga, pemilik usaha *catering*, peracangan, toko kecil, penjual rujak hingga karyawan swasta. Untuk menjadi anggota, persyaratan yang dibutuhkan tidak terlalu

menyulitkan, yaitu menyerahkan copy KTP dan Kartu Keluarga (KK). Namun, untuk dapat benar-benar diterima menjadi anggota Kopwan Annisa, para pengurus melakukan seleksi dengan cara memeriksa profil calon anggotanya. Proses seleksi dan pemeriksaan calon anggota dilakukan secara rahasia, artinya, pengurus tidak mendatangi langsung calon anggotanya, tetapi menanyakan kepada para tetangga atau teman-teman dari calon anggota tersebut, terutama dalam hal kepatuhan dan kejujurannya (misalnya di dalam organisasi ibu-ibu PKK). Karena untuk menjadi anggota koperasi, yang diutamakan adalah ketaatan dalam membayar angsuran cicilan.

Modal awal yang dimiliki Kopwan Annisa adalah Rp 25.000.000 (yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur), ditambah dengan simpanan pokok dari para anggota sebesar Rp 100.000 per orang dan simpanan wajib sebesar Rp 5.000 per orang, dengan demikian total dana yang dikelola pengurus Kopwan Annisa pada awal berdiri sebesar Rp 27.100.000. Setelah kopwan ini menginjak tahun 2013, dana yang dimiliki atau dikelola menjadi sebesar Rp 80.000.000.

### **2.1.2. Koperasi Wanita (Kopwan) Sekartanjung**

Kopwan "Sekartanjung" ini terletak di Kelurahan Sambonggede, Kecamatan Merakurak. Inisiatif pembentukan kopwan yang didirikan pada tahun 2010 ini, berasal dari Kepala Desa Sambonggede karena memang ada instruksi dari pemerintah Kabupaten Tuban agar di setiap desa atau kelurahan membentuk sebuah koperasi wanita. Bersamaan dengan berdirinya Kopwan Sekartanjung, berdiri pula 7 buah Kopwan, di Kecamatan Merakurak. Hingga tahun 2013, telah berdiri 20 Kopwan yang tersebar di seluruh desa/kelurahan Merakurak.

Pada awal berdiri, anggota yang terdaftar pada kopwan ini berjumlah 40 orang, dan unit usaha atau kegiatan utamanya adalah koperasi simpan-pinjam. Pengurus Kopwan Sekartanjung ini hanya terdiri dari 3 orang, yaitu: Ketua, yang juga merupakan istri dari Kepala Desa Sekartanjung, bendahara dan sekretaris. Namun dalam aktivitas sehari-hari, yang mengurus kopwan ini hanyalah bendahara saja, sedangkan ketua dan sekretaris tidak banyak berperan. Modal awal yang dimiliki, selain berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 25.000.000, para anggota dikenai simpanan pokok sebesar Rp 10.000, dan simpanan wajib sebesar Rp 2.000, sehingga dana awal

yang dimiliki kopwan ini sebesar Rp 25.480.000. Seiring dengan berjalannya waktu, maka pada tahun 2013, jumlah dana yang dikelola kopwan ini sudah mencapai Rp 70.000.000 dengan jumlah anggota sebanyak 45 orang.

### **2.1.3. Koperasi Wanita (Kopwan) Srikandi**

Kopwan yang dibentuk pada tahun 2009 dan kemudian disahkan melalui notaris pada tahun 2010 ini, terletak di Kelurahan Kedungrejo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Kegiatan utama kopwan ini adalah koperasi simpan-pinjam, dan jumlah anggota yang dimiliki kopwan pada awal berdiri sebanyak 22 orang. Seiring dengan bergulirnya waktu, dan mungkin pula dengan manfaat yang banyak didapat dari kehadiran kopwan Srikandi di kelurahan Kedungrejo ini, maka pada tahun 2013 jumlah anggotanya bertambah cukup banyak, yaitu mencapai 100 orang.

Sejarah berdirinya Kopwan Srikandi ini sama dengan dua kopwan sebelumnya, di mana proses awalnya adalah karena kepala desa diberitahu oleh pihak kecamatan agar setiap desa membuat sebuah koperasi wanita. Kepala Desa Kedungrejo kemudian menugasi isterinya, yang berperan juga sebagai ketua PKK untuk membentuk koperasi wanita. Berdasarkan permintaan itu, maka kemudian ibu-ibu pengurus PKK Kelurahan/Desa Kedungrejo membentuk kepengurusan kopwan, di mana yang menjadi ketua pada waktu itu adalah Ibu Kepala Desa Kedungrejo, yang dibantu oleh dua orang pengurus, yaitu ibu Sekretaris Lurah sebagai bendahara, dan seorang ibu pengurus PKK yang bertindak sebagai sekretaris Kopwan.

Modal awal yang dimiliki Kopwan Srikandi ini berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu sebesar Rp 25.000.000, ditambah dana simpanan pokok sebesar Rp 100.000 per anggota, sehingga total modal awal yang digulirkan untuk simpan-pinjam oleh pengurus sebesar Rp 27.200.000. Setelah berjalan sekitar tiga tahun (2013), dana yang dikelola oleh kopwan ini menjadi Rp 36.455.000.

## **2.2. Dua Koperasi Wanita di Kabupaten Malang**

### **2.2.1. Koperasi Wanita (Kopwan) Wanita Mandiri**

Kopwan Wanita Mandiri ini terdapat di Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Didirikan pada tahun 2007, namun pada waktu itu

belum memiliki badan hukum, dan baru pada tahun 2009, Kopwan Wanita Mandiri ini memiliki akte notaris, dan secara resmi telah memiliki badan hukum sebagai sebuah koperasi. Berdirinya Kopwan ini awal-mulanya karena mendapat dana bantuan dari Lembaga yang dimiliki oleh Warga Belanda yang ingin membantu masyarakat Indonesia. Dana yang dikucurkan oleh lembaga itu boleh digunakan untuk berbagai kegiatan yang sifatnya produktif, bukan untuk pinjaman konsumtif, dan jika memungkinkan dapat menjadi *income generating* bagi warga yang memang membutuhkan.

Melalui berbagai diskusi dengan pihak-pihak dinas terkait, salah satunya Dinas Koperasi di Kabupaten Malang, akhirnya orang-orang yang mendapat kepercayaan dari lembaga donor Belanda itu, disarankan untuk membuat koperasi wanita. Dana yang dikelola oleh para pengurus kopwan ini, kemudian digunakan untuk memberi bantuan modal usaha dan simpan-pinjam bagi para anggotanya. Namun demikian, Kopwan Wanita Mandiri ini tidak saja memberi pinjaman bantuan modal usaha, tetapi juga mengajarkan cara-cara memasarkan produk, memberi pelatihan bagi para anggotanya yang sebagian besar memiliki usaha, termasuk juga memantau perkembangan usaha yang dijalani oleh para anggotanya.

Saat awal berdiri hingga penelitian ini berlangsung (2013), koperasi ini dikelola oleh empat orang pengurus dan satu orang karyawan yang digaji tetap untuk mengurus kegiatan administrasi dan operasional koperasi. Pada awal berdiri, jumlah anggotanya sebanyak 60 orang dan kesemuanya adalah para ibu. Dalam perkembangannya, Kopwan Wanita Mandiri pernah memiliki anggota hingga mencapai 127 orang. Namun dengan pengalaman yang telah dimiliki oleh para pengurus, pada akhirnya jumlah anggota, hingga tahun 2013, dibatasi hanya sekitar 30 orang saja, di mana 30 orang itu diseleksi atas dasar kemampuan mengelola usaha yang dimilikinya dan prospek usaha yang dikelolanya memang bagus. Modal awal yang dikelola oleh pengurus di Kopwan Wanita Mandiri ini sebesar Rp 180.000.000, dan Omzet yang didapat hingga saat ini, sudah hampir mencapai Rp 300.000.000.

### 2.2.2. Kop-rasi Wanita (Kopwan) Kartini Mandiri

Kopwan Kartini Mandiri ini berada di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Berdiri pada tahun 1998, menjadikan Kopwan Kartini Mandiri ini dapat dianggap cukup

malang dalam pengalaman mengelola kegiatan perkoperasian. Pada awal berdiri, anggotanya hanya 10 orang dan pada saat itu kegiatannya belum sungguh-sungguh dapat disebut sebagai koperasi. Dana yang dimiliki pada saat itu boleh dikatakan minim, karena hanya mengandalkan setoran modal dari anggota, di mana simpanan pokok dari masing-masing anggota hanya sebesar Rp 10.000 dan simpanan wajib sebesar Rp 11.000.

Tahun 2002 merupakan tonggak perubahan bagi koperasi ini untuk meneguhkan kiprahnya menjadi Koperasi Wanita yang bergerak dalam unit usaha simpan-pinjam, dan sejak tahun itu pula Kopwan Kartini Mandiri bergabung atau menjadi anggota dari Pusat Koperasi Wanita (Puskowan) Jati yang cukup besar di Kabupaten Malang. Pada tahun 2002 itu jumlah anggota Kopwan ini telah mencapai 100 orang, dan dana yang dikelola hingga tahun 2013 ini sudah berjumlah Rp 540.000.000, dengan jumlah anggota sebanyak 315 orang, dan bahkan pernah pada tahun-tahun sebelumnya mencapai 500 orang. Seluruh anggota koperasi adalah ibu-ibu atau perempuan yang rata-rata memiliki usaha, seperti memiliki toko pracangan (barang-barang kelontong), dan sebagai pedagang kaki lima atau berdagang kecil-kecilan.

Tabel 3: Matriks Perbandingan Profil Kopwan

No.	Nama Kopwan	Tahun Berdiri	Modal Awal (Rp)	Jumlah Anggota pada awal berdiri	Omzet (Rp) hingga 2013	Jumlah Anggota hingga 2013	Lokasi
1	Annisa	2010	27.100.000	20 orang	80.000.000	60 orang	Kab.Tuban
2	Sekar Tanjung	2010	25.480.000	40 orang	70.000.000	45 orang	Kab.Tuban
3	Srikandi	2009	27.200.000	22 orang	36.445.000	100 orang	Kab.Tuban
4	Wanita Mandiri	2007	180.000.000	60 orang	300.000.000	30 orang	Kab.Malang
5	Kartini Mandiri	1998	210.000	10 orang	540.000.000	315 orang	Kab.Malang

### 3. Pengelolaan/Manajemen Koperasi

#### 3.1. Kasus di Tiga Koperasi Wanita di Kabupaten Tuban

Model pengelolaan atau manajemen di dua koperasi wanita (Kopwan Annisa, dan Kopwan Srikandi) dilakukan secara kolektif, artinya, selain ketua, kepemimpinan koperasi dijalankan oleh sekretaris, bendahara dan dua orang penasehat, di mana kelima orang

tersebut saling berkoordinasi dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk melakukan seleksi bagi para calon anggota. Sedangkan Koperasi Wanita Sekar Tanjung, hanya dikelola oleh tiga orang, yaitu Ketua yang merangkap juga sebagai penasehat, dan itu dipegang oleh Istri Kepala Desa/lurah, bendahara dan seorang sekretaris, namun dalam kegiatan sehari-hari, semua aktivitas dijalankan oleh bendahara. Dalam kondisi yang demikian itu, bendahara yang sekaligus juga menjadi pengurus harian, merasa mendapat beban kerja terberat sehingga ia berharap suatu saat ada pegawai atau karyawan tetap yang bisa dibayar bulanan untuk menjalankan aktivitas pembukuan/administrasi dan operasional harian koperasi.

Sumberdaya manusia yang mengelola koperasi di masing-masing wilayah, memiliki kekhasan atau karakteristik yang berbeda. Bila di Kecamatan Latsari, Kota Tuban (Koperasi Wanita Annisa), semua pengurusnya adalah para ibu yang aktif dalam organisasi Fatayat NU, sedangkan di Kecamatan Kerek (Koperasi Wanita Srikandi), pengurusnya adalah para ibu pengurus PKK setempat, yang juga para isteri perangkat desa, di mana Ibu Kepala Desa berperan sebagai penasehat. Sedangkan di Kecamatan Merakurak, peran isteri kepala desa sangat dominan, di mana ia menjabat sebagai ketua sekaligus penasehat. Perekrutan anggota Kopwan di Kecamatan Merakurak ini pun dilakukan oleh isteri kepala desa tersebut, namun uniknya, ia tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan pengelolaan koperasi, sehingga yang mengetahui kondisi koperasi sesungguhnya adalah bendahara. Dengan kondisi yang demikian itu, maka cukup menyulitkan bagi pengurus, terutama bendahara, untuk mengembangkan unit usaha dan jumlah anggotanya, bahkan ia merasa keberatan dengan beban membuat pembukuan simpan-pinjam dana koperasi. Namun yang cukup menarik, Koperasi Wanita Sekar Tanjung ini terpilih mendapatkan dana hibah kedua, senilai Rp. 25.000.000, sedangkan dua koperasi lainnya (Annisa dan Srikandi) belum mendapatkan dana hibah kedua, meskipun dalam pertemuan-pertemuan dengan Dinas Koperasi Kabupaten Tuban, para pengurus di dua koperasi itu mengajukan usulan agar diberi tambahan dana hibah kedua.

Pola perekrutan anggota di masing-masing koperasi dapat dikatakan hampir sama, di mana hanya "orang-orang terpilih" saja yang bisa dijadikan sebagai anggota. Artinya, mereka yang bisa menjadi anggota adalah memang benar-benar memiliki usaha produktif

(baik yang dikelola oleh ibu sendiri maupun usaha yang telah ditekuni oleh suaminya), jadi para anggota koperasi itu tidak hanya sekadar sebagai ibu rumah tangga saja tetapi juga memiliki usaha yang dapat mendatangkan keuntungan keluarga. Syarat berikutnya adalah bisa dipercaya, dalam arti mampu mengembalikan pinjaman tepat waktu. Agar para anggota kopwan memenuhi kriteria tersebut, maka pengurus memang harus sedikit berkorban dengan mendatangi daerah asal para anggotanya. Seperti yang dilakukan oleh pengurus Kopwan Annisa, beberapa pengurus terlebih dahulu melakukan "wawancara" dengan orang-orang di sekitara tempat tinggal calon anggota (para tetangganya) untuk menanyakan kredibilitasnya. Dengan mekanisme tersebut, maka pengurus berusaha menerapkan prinsip kehati-hatian agar dana pinjaman tidak hilang begitu saja.

Dana yang dikelola oleh masing-masing pengurus kopwan, dipinjamkan kepada anggota dengan cara atau mekanisme yang berbeda-beda. Jika di dua kopwan (Annisa dan Srikandi) dana dipinjamkan kepada masing-masing anggota, maka di Kopwan Sekar Tanjung, pinjaman diberikan kepada kelompok, di mana jika salah satu anggota kelompok tidak membayar cicilan pinjamannya, maka seluruh anggota kelompok lah yang harus menanggungnya (sistem tanggung renteng). Cara seperti itu dipertahankan oleh pengurus Kopwan Sekar Tanjung, agar proses pengembalian pinjaman dapat berjalan dengan baik. Bahkan ketua kelompok mendapatkan insentif sebesar 0,5 persen dari dana yang berhasil dikembalikan oleh para anggotanya jika pembayaran dan pelunasan cicilan dilakukan sesuai dengan jadwal.

Pinjaman yang diberikan kepada para anggota koperasi dilakukan secara selektif. Di Koperasi Sekar Tanjung, jumlah pinjaman yang diberikan untuk masing-masing anggota kelompok berbeda-beda, tergantung dari jenis usaha dan omzet yang diperoleh dari usaha mereka. Sebagai contoh, jika di dalam satu kelompok terdapat anggota yang memiliki usaha berbeda, maka anggota kelompok yang memiliki usaha dan omzet cukup besar yang akan mendapat pinjaman besar. Jadi jika di dalam kelompok itu ada seorang penjual makanan ringan dan penjual beras, maka penjual makanan ringan hanya bisa diberi pinjaman sebesar Rp 500.000, sedangkan pedagang beras bisa mendapatkan pinjaman hingga Rp 5.000.000.

### 3.2. Kasus di Dua Koperasi Wanita di Kabupaten Malang

Berbeda dengan model manajemen atau pengelolaan koperasi di Kabupaten Tuban yang dibentuk karena adanya kucuran dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dua kopwan wanita yang menjadi latar studi ini (Kopwan Wanita Mandiri dan Kopwan Kartini Mandiri) didirikan atas kebutuhan dari para anggotanya sendiri. Oleh karena kedua koperasi ini didirikan bukan karena dorongan atau tekanan dari birokrasi (pemerintah pusat/daerah), maka modal yang dikelolanya juga cukup bervariasi, mulai dari yang relatif minim (Kopwan Kartini Mandiri) maupun karena adanya dana bantuan dari lembaga donor asing (Kopwan Wanita Mandiri).

Kedua koperasi itu mampu berkembang cukup baik, karena manajemen koperasi dilakukan secara profesional. Dikatakan profesional, karena selain peran masing-masing pengurus (mulai dari ketua hingga sekretaris dan pengawas) dapat dijalankan dengan baik, kedua kopwan di Kabupaten Malang ini menggabungkan diri dengan Pusat Koperasi Wanita (Puskowan) Jati, sebuah pusat koperasi wanita yang cukup besar di Kabupaten Malang. Dengan cara menggabungkan diri ke Puskowan Jati itu lah, maka kedua koperasi ini mampu mengembangkan modal yang dimilikinya, dan mendapatkan jumlah anggota serta nasabah yang cukup banyak, sehingga perputaran dana yang terjadi dua kopwan ini cukup cepat. Di induk koperasi (Puskowan Jati), para pengurus di masing kopwan mendapat pelatihan yang cukup baik mengenai pengelolaan atau manajemen perkoperasian. Bahkan, di Kopwan Wanita Mandiri, para pengurus berinisiatif memberikan pelatihan atau pembekalan pengetahuan pula bagi para anggotanya, khususnya dalam hal pengembangan usaha.

Merekrut anggota koperasi di dua kopwan ini juga dilakukan secara selektif. Pertama-tama yang dilakukan oleh pengurus adalah memastikan bahwa calon anggota adalah teman baik dari anggota tetap kopwan dan ia mampu menjamin kredibilitas temannya itu. Dengan cara demikian, maka kedua kopwan di kabupaten Malang ini menerapkan sistem tanggung renteng, baik dalam merekrut anggota, maupun dalam mengelola dana pinjaman. Jumlah anggota kelompok di masing-masing kopwan bervariasi. Di Kopwan Kartini Mandiri, setiap kelompok terdiri dari minimal 10 orang anggota, di mana masing-masing anggota dalam kelompok itu, tempat tinggalnya berdekatan, dan masing-masing anggota sudah mengenal baik satu sama lain. Sedangkan



pembentukan kelompok di Kopwan Wanita Mandiri didasarkan atas kelompok usaha yang ditekuni para anggotanya, seperti kelompok usaha: tanaman hias, pertokoan, pedang sayur, konveksi, mebel, *catering* dan ternak kelinci. Masing-masing anggota dalam kelompok berjumlah minimal 6 orang, yang dipimpin oleh seorang ketua. Peran ketua itu juga sebagai penanggung jawab bagi para anggotanya yang tidak tertib dalam membayar cicilan pinjaman.

Pengelolaan dana di dua kopwan di Kabupaten Malang ini juga dilakukan secara efisien. Seperti di Kopwan Kartini Mandiri, bunga pinjaman dikenakan sebesar 2 persen, dan di Kopwan Wanita Mandiri, bunga pinjaman dikenakan antara 1 hingga 3 persen. Memang bunga pinjaman di kedua koperasi itu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan koperasi-koperasi lainnya. Namun, dengan persyaratan pinjaman yang mudah, dan bagi hasil yang menarik (diberikan dalam bentuk dana Sisa Hasil Usaha atau SHU) maka cukup banyak anggota yang merasakan manfaat dari kehadiran kopwan ini. SHU di Kopwan Kartini Mandiri dibagikan setiap tahun, dengan rincian: 45 persen diberikan untuk anggota, 10 persen diberikan kepada pengurus sebagai uang lelah dalam mengelola koperasi, 5 persen untuk karyawan, 5 persen diberikan kepada pengawas, 5 persen digunakan juga untuk biaya pendidikan dan pelatihan, dan sisanya, 30 persen digunakan sebagai dana cadangan.

Kegiatan pelatihan dan pendidikan, nampaknya menjadi agenda yang cukup penting di dua koperasi ini. Jika Kopwan Kartini Mandiri menyisihkan sebagian dari SHU untuk memberi pelatihan bagi para anggotanya, di Kopwan Wanita Mandiri pun para pengurusnya memiliki perhatian yang cukup besar terhadap pembekalan pengetahuan dan keterampilan bagi para anggotanya. Pelatihan-pelatihan kewirausahaan (seperti: membuat tahu, kecap, batik tulis, menyulam, dan sebagainya) serta cara dan strategi pemasaran produk, secara periodik diberikan kepada para anggota Kopwan Wanita Mandiri.

## **4. Peran Kopwan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan**

### **4.1. Potensi dan Kekuatan Koperasi Wanita**

Koperasi yang dikelola oleh para wanita ini memiliki kekuatan atau ketangguhan, khususnya dalam mengelola anggota yang dari tahun ke tahun semakin banyak

jumlahnya. Koperasi Wanita Annisa (Kab.Tuban), pada awal berdiri (2010) jumlah anggotanya hanya 20 orang, namun menginjak pada tahun ketiga ini (2013), jumlah anggotanya sudah menjadi 50 orang; Koperasi Wanita Srikandi (Kab.Tuban), pada awal berdiri (2010) hanya beranggotakan 22 orang, dan menginjak tahun 2013, jumlah anggotanya menjadi 100 orang. Begitu pula pada Kopwan Kartini Mandiri (Kab.Malang), pada awal berdiri (1998) jumlah anggotanya 10 orang, namun setelah berjalan sekitar 15 tahun, jumlah anggotanya telah berkembang sangat banyak, yaitu menjadi 315 orang. Dengan banyaknya jumlah anggota di tiga kopwan yang menjadi *setting* studi ini, maka perputaran dana yang dikelola para pengurus dapat berjalan lebih cepat, dan hal itu berpengaruh pula terhadap omzet dan peningkatan pendapatan yang diperoleh masing-masing kopwan. Sebagai contoh, salah satu anggota Kopwan Annisa (Kab. Tuban), mengakui bahwa ketika pada awal menjadi anggota koperasi, dana yang boleh dipinjam maksimal Rp 1.000.000. Namun setelah beberapa kali ia melakukan pinjaman, ia boleh meminjam hingga Rp 5.000.000, dengan jangka waktu pengembalian selama 1 tahun (diciil selama 12 kali). Begitu pula di Kopwan Kartini Mandiri, jumlah pinjaman bisa cukup besar, lebih dari Rp 5.000.000, tetapi ada tambahan persyaratan, yaitu memberikan jaminan, seperti BPKB kendaraan bermotor yang dimiliki anggota.

Agak berbeda dengan perkembangan jumlah anggota di tiga kopwan yang telah disebutkan di atas, dua kopwan berikut ini yaitu Kopwan Sekar Tanjung (Kab.Tuban) dan Kopwan Wanita Mandiri (Kab. Malang), memiliki keunikan tersendiri. Kedua kopwan ini nampaknya tidak mementingkan pengembangan jumlah anggota, tetapi lebih pada upaya mengelola anggota yang sudah ada dan meningkatkan kualitas para anggotanya. Di Kopwan Sekar Tanjung (Kab. Tuban), pada awal berdiri (2010) hingga tahun 2013 ini, jumlah anggotanya tidak bertambah banyak, bahkan cenderung stagnan, yaitu hanya menambah anggota sebanyak 4 orang. Sedangkan di Kopwan Wanita Mandiri, anggotanya bahkan menyusut menjadi separohnya, yaitu dari yang semula beranggotakan 60 orang (tahun 2007), dan pada tahun 2013, hanya dipertahankan 30 anggota saja. Kedua kopwan ini cenderung selektif dalam memilih atau menentukan anggotanya. Dengan jumlah anggota yang relatif sedikit itu, maka pengurus mampu mengontrol perputaran dana dan perkembangan usaha dari para anggotanya.

Kekuatan lainnya yang dimiliki oleh pada umumnya koperasi simpan-pinjam ini adalah: (1) Kemudahan persyaratan administrasi untuk menjadi anggota. Untuk menjadi anggota, cukup menyerahkan foto copy KTP, KSK, dan surat persetujuan suami (pada semua Kopwan di Kabupeten Tuban) atau surat jaminan yang bisa dijadikan bukti kepemilikan barang, seperti BPKB (pada beberapa Kopwan di Kabupaten Malang); (2) Jangka waktu pengembalian pinjaman yang fleksibel. Meskipun pengurus mematok waktu pengembalian pinjaman maksimal 1 hingga 2 tahun, namun para anggota dapat menawarnya menjadi lebih cepat ataupun lebih lambat, tergantung kebutuhan dan kesulitan yang mungkin dialami masing-masing anggota yang meminjam; (3) Membiasakan menabung bagi para anggotanya, karena disamping mereka harus membayar cicilan pinjaman, pengurus di beberapa kopwan juga mewajibkan kepada para anggotanya untuk menabung melalui dana sumbangan suka rela, sehingga ketika para anggotanya membutuhkan dana mendadak (seperti untuk membayar baju seragam bagi anak-anak yang mulai masuk sekolah, atau kebutuhan lebaran), mereka dapat mengambilnya dari koperasi. Bahkan ada beberapa kopwan yang mampu menyediakan paket lebaran bagi para anggotanya, meskipun dananya tidak besar, semisal hanya Rp 25.000 per anggota, di mana dana paket lebaran itu diambilkan dari sebagian keuntungan koperasi; (4) bunga yang dikenakan pada para anggota relatif rendah, yaitu sekitar 1 hingga 2 persen dan dana administrasi pinjaman yang dikenakan juga cukup ringan, yaitu rata-rata sebesar Rp 10.000 per peminjaman; (5) Mampu menghimpun dan menggerakkan potensi ekonomi kaum perempuan, terbukti hampir sebagian besar anggotanya memiliki usaha mandiri, mulai dari usaha kecil (berdagang kaki lima, penjual makanan ringan di pinggir jalan, penjual bensin eceran, penjual pulsa eceran, warung kopi) usaha yang terbilang menengah (usaha catering, toko kelontong, bisnis busana *on-line*, hingga usaha yang dapat dikatakan bermodal besar (seperti pemilik butik, rumah sewa atau kos-kos-an, dan pemilik toko serba ada/*mini market*); (6) Bagi koperasi yang menerapkan sistem tanggung renteng atau kelompok bagi para anggotanya, menjadi salah satu cara yang cukup efektif untuk mendisiplinkan para anggota dalam pengembalian pinjaman; (7) Ketertiban para pengurus untuk melaporkan kegiatan koperasi, melalui mekanisme Rapat Anggota Tahunan, sekaligus dalam kegiatan tersebut dibagikan dana Sisa Hasil Usaha bagi para anggotanya; (8) Kedisiplinan anggota/para ibu untuk membayar tepat waktu, bahkan

ada yang mempercepat pembayaran cicilan pinjamannya (istilahnya “diguling”), agar dapat segera meminjam untuk periode berikutnya. Hampir semua kopwan yang menjadi setting studi ini mengatakan, bahwa sekitar 90 persen anggotanya mampu membayar cicilan pinjaman tepat waktu.

#### 4.2. Kelemahan atau Kendala yang Dimiliki Kopwan

Semua kopwan yang menjadi latar studi ini, sejak awal berdiri bergerak dalam bidang atau unit usaha simpan pinjam (Koperasi Simpan Pinjam). Dua kopwan yang ada di Kabupaten Malang (Wanita Mandiri dan Kartini Mandiri) memantapkan langkahnya hanya pada satu unit usaha, yaitu usaha simpan-pinjam. Berbeda halnya dengan keinginan para pengurus kopwan di kabupaten Tuban, di mana ada keinginan dari beberapa pengurus, untuk mengembangkan unit usaha di bidang lain, seperti: penjualan bahan-bahan kebutuhan pokok atau *minimarket* (seperti keinginan pengurus di Koperasi Annisa, Kecamatan Latsari), persewaan terop, meja-kursi dan alat-alat pesta (seperti keinginan pengurus di Koperasi Srikandi, Kecamatan Kerek). Kesulitan atau kendala dari pengurus kopwan untuk mengembangkan unit usaha di bidang lain, terietak pada persoalan permodalan. Ketiga koperasi tersebut tumbuh dan berkembang hanya mengandalkan dana yang diperoleh dari modal awal yang didapatkan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hingga saat ini pun mereka hanya mengandalkan keuntungan dari perputaran modal awal. Dana yang berkembang dari kegiatan simpan pinjam tersebut, cenderung habis atau berputar untuk dipinjamkan kembali kepada para anggotanya.

Oleh karena modal awal koperasi ini sepenuhnya berasal dari dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka upaya dari para anggota untuk menyeter simpanan wajib maupun simpanan sukarela dalam jumlah yang relatif cukup besar sebagai tambahan modal bagi koperasi, sangat sulit dilakukan. Para pengurus dan anggota menyadari bahwa dana yang mereka kelola adalah dana milik pemerintah (dana hibah), oleh karena itu mereka cenderung sekadar memanfaatkan dana tersebut sebatas modal dan keuntungan yang dapat dicapai dari pengembangan usaha simpan-pinjam. Bahkan ada beberapa anggota yang enggan mengembalikan pinjaman, karena mereka menganggap bahwa dana itu bukanlah milik pengurus, tetapi milik pemerintah. Akibatnya, ketika para pengurus berusaha menagih dana pinjaman ke beberapa anggota yang

memiliki pemikiran seperti itu, mereka merasa kesulitan. Akibatnya, beberapa anggota yang memiliki tabiat atau pemikiran seperti itu, perlahan-lahan dikeluarkan dari keanggotaan.

Selain karena modal yang dikelola relatif sedikit (pada Kopwan di Kabupaten Tuban) sehingga keinginan mengembangkan unit usaha terhentur oleh minimnya dana yang dimiliki kopwan, beberapa kelemahan atau kendala lainnya yang dialami pengurus dan anggota kopwan antara lain adalah: (1) Pengurus harus benar-benar selektif dalam memilih anggota karena kalau salah memilih anggota maka dana pinjaman mungkin tidak dapat kembali tepat waktu, dan bahkan bisa jadi dana yang dikelola tidak dapat berkembang dengan baik; (2) Jumlah pinjaman tidak bisa terlalu besar, karena dana yang ada harus dibagi secara adil kepada seluruh anggota (untuk beberapa kopwan di Kabupaten Tuban); (3) Untuk beberapa kopwan di Kabupaten Tuban, pengurus belum mampu memberikan pelatihan atau pendidikan bagi para anggotanya untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih maju dan professional; (4) Kesulitan mengendalikan anggota yang sulit membayar cicilan pinjaman tepat waktu khususnya jika pengurus tidak membentuk kelompok-kelompok tanggung renteng; (5) manajemen atau pengelolaan kopwan belum dapat dilakukan secara professional, misalnya dengan menggaji para pengurus atau karyawan secara layak agar mereka mampu mengendalikan kegiatan koperasi setiap hari (di Kopwan Annisa, pengurus hanya mendapat honor sebesar Rp 25.000, per bulan sebagai "ongkos lelah" mengurus koperasi), juga karena keterbatasan kemampuan para pengurus dalam memikirkan dan mengembangkan koperasi menjadi lebih baik.

#### **4.3. Hambatan atau Ancaman yang Dihadapi Kopwan**

Beberapa hambatan dan bahkan dapat pula menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup kopwan antara lain adalah: (1) kopwan yang modal awalnya dari pemerintah, cenderung stagnan dan sulit berkembang, karena peningkatan omzet dan modal disetor tidak bertambah secara signifikan. Hal itu karena pengurus hanya memutar modal dengan cara meminjamkan kepada anggota, dan keuntungan yang didapat hanya sekitar 1 hingga 2 persen dari tiap-tiap pengembalian pinjaman. Pada akhirnya, satu-satu jalan yang diharapkan oleh para pengurus koperasi adalah berharap mendapatkan kucuran

modal baru dari pemerintah. Namun, harapan itu juga sulit untuk segera diwujudkan karena kriteria penerima dana tambahan dari pemerintah provinsi juga masih tidak dipahami oleh para pengurus; (2) Ancaman lainnya yang dihadapi oleh para pengurus koperasi wanita adalah dengan munculnya pesaing baru berupa “koperasi milik swasta” yang sudah beroperasi di berbagai wilayah di pedesaan Kabupaten Tuban dan Malang, serta para rentenir atau “bank thitil” yang menerapkan persyaratan dan bunga yang hampir sama dengan koperasi wanita; (3) Melalui pola pemilihan anggota koperasi yang cenderung selektif, maka pada akhirnya kopwan di dua kabupaten itu cenderung dikatakan eksklusif. Artinya, perekrutan anggota pada akhirnya terbatas hanya pada orang-orang yang “mampu”, dalam arti, selain mampu mengembalikan pinjaman tepat waktu, mampu pula mengembangkan usaha menjadi lebih besar karena akumulasi modal yang dimilikinya, sedangkan bagi masyarakat yang dianggap “tidak mampu”, yang disebabkan karena ketidakmampuannya untuk membayar cicilan secara tertib, juga warga masyarakat yang memang miskin atau kemampuan ekonominya lemah, cenderung tidak diberi kepercayaan untuk menjadi anggota koperasi; (4) Daya jangkauan kopwan yang baru, terutama yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, masih sangat rendah, terutama untuk merekrut anggota-anggota baru, karena cara perekrutan anggota baru yang dilakukan di hampir setiap desa/kelurahan, adalah melalui organisasi-organisasi atau kelompok kaum ibu yang sudah mapan, seperti kelompok ibu-ibu PKK, organisasi Fatayat NU, para pengajar PAUD atau kader Posyandu, sedangkan kelompok perempuan marginal, seperti pedagang di pasar tradisional, para pemilik warung, kios atau lapak kaki lima di pinggir-pinggir jalan seringkali luput dari jangkauan kopwan.

#### 4.4. Peluang Koperasi Wanita untuk Berkembang

Oleh karena jumlah anggota di masing-masing kopwan yang menjadi latar penelitian ini semakin bertambah, maka peluang koperasi wanita untuk berkembang dan semakin bermanfaat bagi para anggotanya cukup besar. Apalagi ditambah dengan manajemen pengelolaan koperasi yang tidak sekaku lembaga perbankan atau “bank thitil” yang cenderung menganalib keuntungan besar, maka koperasi wanita dikelola dari dan untuk para anggota itu cenderung mampu bertahan dan tetap dibutuhkan oleh para wanita dari kelompok masyarakat menengah-bawah yang ingin mengembangkan

usahanya secara mandiri. Beberapa peluang lainnya yang dimiliki koperasi wanita untuk berkembang, antara lain adalah: (1) kopwan mampu mengalahkan *bank thithil* atau rentenir, karena bunganya yang jauh lebih rendah dari pada rentenir atau bank *thithil* tersebut (misalnya pinjaman yang diminta nasabah *bank thithil* Rp 2.000.000, tetapi yang didapat nasabah tidak sebesar itu, karena dana itu dipotong lebih dulu untuk cicilan pertama dan biaya administrasi); (2) jika pengurus kopwan mampu menjaring sebanyak-banyaknya jumlah anggota, maka dengan berkembangnya anggota akan menambah dana yang dapat dikelola oleh pengurus. Bertambahnya jumlah anggota itu berseiring dengan manfaat yang diperoleh para anggotanya, karena menurut pengakuan para anggota, kehadiran kopwan semacam ini, sangat membantu mereka untuk mengembangkan usahanya, terutama ketika membutuhkan dana tambahan untuk modal pengembangan usaha; (3) mampu mengalahkan bank konvensional yang mengenakan bunga tinggi kepada para nasabah yang meminjam di bank, dan juga memprasyaratkan jaminan atau agunan bagi para peminjamnya (\*).

## **BAB VI**

### **RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA**

Studi tentang Kopwan ini menurut rencana akan dilaksanakan secara berkelanjutan dalam dua tahun anggaran. Di tahun 2013 ini, secara garis besar ada empat permasalahan yang dicoba dikaji, yaitu: (1) Sebagai Lembaga Keuangan Mikro, kendala dan situasi problematik apa sajakah yang dihadapi Kopwan dalam pengembangan dan pengelolaan modal usahanya?. (2) Bagaimana gambaran tentang mekanisme yang dikembangkan Kopwan di Jawa Timur dalam manajemen pengelolaan keuangan, aspek administrasi, produksi dan aspek pemasarannya?, (3) Sejauhmana keberadaan Kopwan di Jawa Timur mampu berperan dalam memenuhi kebutuhan sosial anggotanya, meningkatkan tingkat kesejahteraan anggota serta masyarakat di sekitarnya? Termasuk di sini, sejauhmana kehadiran Kopwan telah berperan sebagai media aktualisasi diri peran dan potensi perempuan?, dan (4) Sejauhmana kehadiran Kopwan di Jawa Timur telah mampu mendorong pertumbuhan usaha ekonomi kerakyatan di wilayahnya? Termasuk di sini, sejauhmana Kopwan mampu mandiri, bersaing dan menggantikan peran lembaga perkreditan informal yang acapkali merugikan masyarakat, seperti *rentenir*, *bank thithil* dan pengijon?

Dari hasil studi yang telah dilakukan, beberapa temuan pokok studi ini adalah: (1) Bahwa sebagai lembaga keuangan mikro, faktor yang acapkali menghambat kinerja Kopwan dalam mendukung pengembangan UMKM dan upaya peningkatan kesejahteraan anggotanya di satu sisi adalah keterbatasan modal usaha yang dimiliki dan di sisi lain cara kerja rentenir atau pelepas uang lain yang umumnya sangat fleksibel, dan bersikap pro-aktif menjemput bola langsung mendatangi masyarakat ke rumah atau ke tempat kerja mereka, (2) Sebagai lembaga koperasi, manajemen pengelolaan keuangan Kopwan seringkali dihadapkan pada dilema antara mendahulukan efisiensi atau memilih lebih mendahulukan efektivitas pencapaian tujuan pendirian Kopwan, (3) Bagi kaum perempuan di pedesaan kehadiran dan pendirian Kopwan terbukti menjadi media yang fungsional bagi mereka untuk beraktualisasi diri di luar ranah domestik, dan kehadiran lembaga ini sedikit-banyak diakui juga telah merangsang tumbuhnya keterlibatan dan



keberdayaan perempuan sebagai salah satu tiang penyangga ekonomi keluarga melalui berbagai kegiatan ekonomi kerakyatan yang mereka kembangkan berkat dukungan modal usaha dari Kopwan, (4) Meski pun prosedur meminjam ke Kopwan dinilai mudah dan suku bunga pinjaman juga relatif kecil, tetapi pinjaman modal usaha yang diperoleh kaum perempuan dari Kopwan umumnya belum berperan optimal dalam mendukung upaya pengembangan kegiatan ekonomi kerakyatan. Selain sebagian pinjaman acapkali dimanfaatkan untuk kegiatan yang sifatnya konsumtif, tidak jarang terjadi anggota Kopwan yang memperoleh pinjaman modal usaha mengalami proses pengikisan modal karena usaha yang ditekuni berjaian stagnan, bahkan meengalami kemunduran.

Untuk tahun anggaran 2014, menurut rencana studi yang dilakukan akan lebih fokus mengkaji peran Kopwan dalam mendukung pengembangan kegiatan ekonomi kerakyatan dan upaya penanganan kemiskinan masyarakat di pedesaan. Subjek yang akan dikaji, menurut rencana adalah kaum perempuan miskin yang telah berkeluarga, dan yang menekuni UMKM. Sedangkan beberapa permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik sosial-ekonomi perempuan anggota Kopwan yang memperoleh pinjaman modal usaha dari Kopwan dan saat dilakukan penelitian tengah menekuni UMKM?
2. Dari mana sajakah asal sumber permodalan yang dimiliki kaum perempuan anggota Kopwan yang mengembangkan UMKM? Sejauhmana mereka mengalami proses pengikisan modal dari usaha yang saat ini mereka tekuni?
3. Kendala-kendala apa sajakah yang menghambat upaya kaum perempuan anggota Kopwan dalam mengembangkan UMKM?
4. Mekanisme seperti apakah yang dikembangkan perempuan anggota Kopwan dalam mempertahankan dan mendorong perkembangan UMKM yang mereka tekuni?

Dalam kegiatan studi di tahun 2014, lokasi penelitian menurut rencana akan diperluas di 4 kabupaten, yang memiliki atau merupakan daerah sentra UMKM. Keempat daerah yang akan diteliti, menurut rencana adalah Kabupaten Tuban, Malang, Nganjuk, dan Pasuruan (\*).

## **BAB VII**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kopwan adalah salah satu lembaga sosial-ekonomi yang secara terencana didorong perkembangannya di Provinsi Jawa Timur dengan tujuan untuk memberi ruang bagi kiprah kaum perempuan dan sekaligus sebagai wadah untuk membantu kaum perempuan (anggota Kopwan) untuk memberdayakan usaha dan tingkat kesejahteraan mereka melalui penyaluran bantuan pinjaman modal usaha berbunga murah. Meski ada banyak kemajuan telah berhasil dicapai pasca dikembangkan Kopwan di berbagai daerah, tetapi secara objektif harus diakui masih ada banyak hal yang perlu dibenahi dan diperhatikan sehubungan dengan kinerja Kopwan di berbagai daerah.

Sebagai sebuah lembaga sosial-ekonomi yang bergerak di akar rumput, pendirian dan pengembangan Kopwan di berbagai daerah di Jawa Timur sebetulnya adalah sebuah langkah strategis. Namun demikian, dalam pelaksanaannya di lapangan sudah barang tentu masih ada banyak kendala yang dihadapi, bahkan berbagai bias yang menyebabkan tujuan pendirian Kopwan belum dapat tercapai secara optimal. Benar bahwa kehadiran Kopwan terbukti memberikan berbagai manfaat, baik dalam membuka ruang beraktualisasi bagi perempuan maupun dalam rangka mendorong pengembangan kegiatan ekonomi kerakyatan. Tetapi, karena tidak didukung dana atau modal kerja yang memadai, maka yang terjadi di lapangan adalah ruang gerak dan luas cakupan kerja Kopwan Jatim umumnya menjadi sangat terbatas. Terlebih, dalam praktik tidak sekali-dua kali pihak pengurus harus berhadapan dengan situasi yang serba dilematis, terutama ketika harus memilih antara mendahulukan prinsip efisiensi pengelolaan atautkah prinsip efektivitas pencapaian tujuan.

Di Bab Penutup ini, selain akan dikemukakan kembali sejumlah isu prioritas yang perlu menjadi fokus perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka memahami kendala yang menghambat lembaga ini belum dapat bekerja secara optimal, berikutnya juga akan dikemukakan sejumlah saran yang perlu dikembangkan untuk memperbaiki kinerja Kopwan di masa mendatang.

## 1. Kesimpulan

Dari hasil kajian lapangan yang telah dilakukan, beberapa isu prioritas yang perlu mendapat perhatian adalah:

1. Sebagai lembaga keuangan mikro, faktor yang acapkali menghambat kinerja Kopwan dalam mendukung pengembangan UMKM dan upaya peningkatan kesejahteraan anggotanya di satu sisi adalah keterbatasan modal usaha yang dimiliki dan di sisi lain cara kerja rentenir atau pelepas uang lain yang umumnya sangat fleksibel, dan bersikap pro-aktif menjemput bola langsung mendatangi masyarakat ke rumah atau ke tempat kerja mereka. Meski sebagai modal awal dan tambahan modal selama ini Kopwan telah memperoleh kucuran dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, namun karena anggota yang harus dilayani dan yang membutuhkan bantuan pinjaman modal usaha jauh lebih besar jumlahnya, maka modal yang ada dan daya jangkau layanan Kopwan tetap saja masih belum memadai. Sejumlah informan yang diwawancarai menyatakan bahwa dengan adanya Kopwan sesungguhnya bagi sebagian kaum perempuan miskin telah terbukti memberikan banyak manfaat karena besar suku pinjaman yang ditawarkan jauh lebih murah atau lebih rendah daripada rentenir, *bank thithil* atau pelepas uang informal lainnya. Tetapi, sekali lagi karena modal yang dimiliki terbatas, seringkali anggota Kopwan yang tidak kebagian memperoleh pinjaman modal dari Kopwan terpaksa meminjam ke rentenir karena adanya kebutuhan dana yang tidak bisa ditunda. Menurut informasi, dalam setahun diperkirakan Kopwan rata-rata hanya bisa melayani sekitar 50-70 anggota, padahal jumlah penduduk miskin dan kaum perempuan anggota Kopwan yang membutuhkan pinjaman jauh lebih banyak dari itu.
2. Sebagai lembaga koperasi, manajemen pengelolaan keuangan Kopwan seringkali dihadapkan pada dilema antara mendahulukan efisiensi atau memilih lebih mendahulukan efektivitas pencapaian tujuan pendirian Kopwan. Dari informasi yang diperoleh di lapangan, sering terjadi pengurus Kopwan pada akhirnya lebih memilih mengembangkan pola pengelolaan yang mengedepankan efisiensi, yaitu memberikan pinjaman kepada anggota yang dinilai bisa memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan menunggak cicilan pinjaman daripada memberikan

pinjaman kepada anggota Kopwan yang dinilai riskan menunggak pembayaran cicilan pinjaman. Kekhawatiran akan terjadi tunggakan pembayaran cicilan yang ujung-ujungnya akan menyebabkan modal Kopwan berkurang adalah salah satu ketakutan terbesar yang menghantui pengurus Kopwan, sehingga bagi anggota yang membutuhkan tetapi miskin dan rawan menunggak cicilan akhirnya dengan terpaksa dinomorduakan. Di sisi yang lain, dalam rangka mendorong perkembangan Kopwan para pengurus sebetulnya berkepentingan untuk terus menambah jumlah anggota. Namun demikian, para pengurus sendiri acapkali menghadapi situasi dilematis antara menambah jumlah anggota dengan konsekuensi anggota yang ada sebelumnya tidak memperoleh giliran/kesempatan untuk meminjam lagi ke Kopwan, atau tetap mempertahankan jumlah anggota yang lama, tetapi dengan konsekuensi lembaga tersebut tidak cepat berkembang. Dengan modal yang terbatas, salah satu tantangan yang dihadapi Kopwan adalah bagaimana mereka mampu memberi pinjaman modal usaha kepada seluruh anggota secara merata.

3. Bagi kaum perempuan di pedesaan kehadiran dan pendirian Kopwan di berbagai daerah, dalam batas-batas tertentu memang telah terbukti menjadi media yang fungsional bagi mereka untuk beraktualisasi diri di luar ranah domestik. Menjadi pengurus Kopwan, misalnya bagi sebagian kaum perempuan merupakan bentuk komitmen sekaligus kiprah mereka untuk beraktualisasi di ruang publik. Sementara itu, bagi kaum perempuan yang menjadi anggota Kopwan, kehadiran lembaga ini sedikit-banyak diakui juga telah merangsang tumbuhnya keterlibatan dan keberdayaan perempuan sebagai salah satu tiang penyangga ekonomi keluarga melalui berbagai kegiatan ekonomi kerakyatan yang mereka kembangkan berkat dukungan modal usaha dari Kopwan. Meski tidak semua pinjaman dari Kopwan dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, tetapi bagi kebanyakan anggota Kopwan yang memperoleh bantuan pinjaman modal dari Kopwan, mereka cenderung memanfaatkan pinjaman itu untuk memperbesar usaha yang ditekuni atau berusaha mengembangkan usaha baru yang bisa dijadikan sumber tambahan penghasilan bagi keluarga mereka.

4. Nilai lebih dan sekaligus keuntungan meminjam ke Kopwan adalah karena lembaga ini dinilai memiliki mekanisme kerja yang nyaris sama dengan lembaga kredit informal, tetapi dari segi beban suku bunga yang harus ditanggung jauh lebih ringan daripada jika masyarakat meminjam ke rentenir yang acapkali mematok beban suku bunga yang tinggi. Yang menjadi masalah sekarang: meski pun prosedur meminjam ke Kopwan dinilai mudah dan suku bunga pinjaman juga relatif kecil, tetapi pinjaman modal usaha yang diperoleh kaum perempuan dari Kopwan umumnya belum berperan optimal dalam mendukung upaya pengembangan kegiatan ekonomi kerakyatan. Selain sebagian pinjaman acapkali dimanfaatkan untuk kegiatan yang sifatnya konsumtif, tidak jarang terjadi anggota Kopwan yang memperoleh pinjaman modal usaha mengalami proses pengikisan modal karena usaha yang ditekuni berjalan stagnan, bahkan meengalami kemunduran. Sejumlah informan menuturkan bahwa di tengah iklim persaingan usaha yang makin ketat, prospek perkembangan UMKM cenderung terbatas, bahkan tak kuat bertahan hidup ketika harus menghadapi iklim yang makin kompetitif dan serbuan produk impor yang murah.

## 2. Saran

Upaya memberdayakan kaum perempuan, mendorong perkembangan kegiatan ekonomi kerakyatan, dan sekaligus mengembangkan kinerja Kopwan pada dasarnya adalah satu paket program yang seyogianya dilakukan secara terpadu. Berikut sejumlah saran yang perlu diperhatikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kinerja Kopwan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi kendala keterbatasan modal, selain menggandakan diri pada dukungan kucuran dana dari pemerintah, para pengurus Kopwan sebaiknya juga menjajagi sumber-sumber dana lain yang potensial, semisal dari program CSR, program *Community Development* dari berbagai BUMN dan lain-lain --termasuk dukungan dana swamandiri-- dari masyarakat yang menjadi anggota Kopwan agar dapat diperluass daya jangkau layanan Kopwan untuk memberi pinjaman modal usaha bagi anggotanya secara merata dan berkelanjutan. Sudah barang tentu, untuk memastikan agar dukungan dan bantuan tambahan modal usaha bagi



Kopwan tidak salah arah, perlu dilakukan audit dan kontrol yang benar-benar ketat agar dapat dicegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan pemanfaatan dana Kopwan.

2. Para pengurus Kopwan secara umum masih sangat membutuhkan pelatihan-pelatihan dan pendampingan yang berkaitan dengan perbaikan pengelolaan atau manajemen pengelolaan koperasi secara professional. Kopwan idealnya dikelola secara sistematis, efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Manajemen yang profesional juga sekaligus dapat menjadi bekal kopwan bersaing dengan lembaga-lembaga sejenisnya. Di samping itu, Kopwan secara umum juga masih sangat membutuhkan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan usaha sehingga kopwan dapat meningkatkan kinerjanya dan memperbesar keuntungan bagi anggotanya. Pengembangan usaha untuk kopwan idealnya tidak saja dikaitkan dengan kebutuhan peran perempuan (*domestic*) tetapi juga idealnya dikaitkan dengan pengembangan potensi produktif anggota kopwan yang bermanfaat dalam memperkuat penyangga ekonomi keluarga sekaligus media bagi perempuan melakukan aktualisasi diri. Di berbagai daerah, adalah langkah yang strategis dan ideal, jika untuk mempermudah akses pengurus Kopwan dan anggota Kopwan melakukan konsultasi tentang manajemen dan sekaligus upaya pengembangan kegiatan produktif, di tiap-tiap kecamatan kemudian dapat didirikan Klinik Konsultasi Kopwan yang melayani kebutuhan dan sekaligus memfasilitasi upaya pengembangan Kopwan dan kegiatan wirausaha kaum perempuan di berbagai daerah. Untuk tahap awal pembinaan, proses pembinaan Kopwan memang bisa dilakukan dengan cara bekerjasama dengan Kopwan-Kopwan yang sudah terbukti eksis, seperti Puskowanjati. Tetapi, untuk jangka panjang ada baiknya jika pembinaan yang berkelanjutan dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan Kopwan itu sendiri, yaitu melalui pendirian Klinik Kopwan di masing-masing kecamatan.
3. Ke depan, peran strategis Kopwan yang perlu dikembangkan, antara lain meliputi: (1) sebagai lembaga substitutif untuk bersaing, dan bahkan mengganti peran lembaga perkreditan informal yang acapkali merugikan masyarakat karena membebani mereka dengan suku bunga yang mencekik leher, (2) sebagai lembaga

pendukung perkembangan kegiatan ekonomi kerakyatan, dan (3) sebagai wadah bagi upaya pemberdayaan peran perempuan. Ketiga peran utama Kopwan ini, perlu memperoleh perhatian khusus agar dapat dijamin konsistensi dan keterpaduan dalam proses perkembangan Kopwan di berbagai daerah.

4. Dalam proses pembinaan dan pendampingan yang diberikan kepada para pengurus Kopwan di berbagai daerah seyogianya tidak hanya pendampingan untuk kepentingan perbaikan administrasi dan manajemen lembaga, tetapi juga pendampingan dalam rangka mendorong dan memfasilitasi pengembangan usaha produktif dari para anggota Kopwan agar kegiatan usaha yang dikembangkan Kopwan tidak hanya dalam bentuk simpan-pinjam, melainkan bisa pula dikembangkan untuk berbagai kegiatan produktif yang lain. Dengan kata lain, dalam rangka memperbesar modal kerja yang dimiliki, para pengurus Kopwan seyogianya tidak hanya mengantungkan pada usaha simpan-pinjam saja, tetapi perlu mengembangkan diversifikasi usaha ke berbagai bidang yang lain, yang menguntungkan, tanpa harus keluar dari koridor tujuan sosial pendirian koperasi. Dalam hal ini, para pengurus Kopwan ada baiknya jika menjajagi kerjasama dengan lembaga lain, seperti KUD, dan lain-lain untuk mempeluas bidang usaha yang ditekuni demi meningkatkan kesejahteraan anggota Kopwan. Bidang-bidang usaha yang potensial di berbagai daerah perlu diidentifikasi dan menjadi lahan garapan Kopwan agar eksistensi Kopwan tidak melulu tergantung kepada dukungan bantuan modal usaha dari pemerintah saja, tetapi mampu secara mandiri mencapai tambahan modal usaha melalui kegiatan-kegiatan produktif lain yang menguntungkan.
5. Sesuai dengan isi Undang-Undang Koperasi yang terbaru, perkembangan koperasi ke depan --tak terkecuali Kopwan-- diharapkan mengacu pada pengembangan salah satu bidang, yaitu produksi, konsumsi, jasa pelayanan dan jasa simpan-pinjam. Mulai saat ini, untuk menjamin kontinuitas perkembangan Kopwan di Jawa Timur seyogianya mulai dikondisikan untuk memilih salah satu bidang pengembangan, dan segera dilakukan pelatihan bagi pengurus Kopwan sesuai dengan bidang pengembangan koperasi yang dipilih. Pelatihan ini perlu segera dilakukan untuk membantu proses persiapan pengembangan Kopwan yang



lebih spesifik, sesuai dengan kompetensi dan pilihan pengurus Kopwan itu sendiri. Berbeda dengan lembaga keuangan lain yang belum berbentuk koperasi, Kopwan adalah lembaga resmi yang berkembang dan dikembangkan dengan mengacu pada Undang-Undang Koperasi dan berbagai peraturan yang ada, sehingga agar tidak terjadi salah urus dalam perkembangan Kopwan ke depan, maka sejak awal perlu dipersiap SDM-SDM pengurus Kopwan yang benar-benar memahami ke mana mereka bakal berkembang di masa depan (\*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Ricardi S., 2009. "Kekuatan Kapital-Kapital Kelembagaan: Belajar Dari Dua Koperasi Sukses", dalam: *Jurnal Sosiologi Masyarakat* Vol. 15 No. 1, Januari 2009.
- Bayo Ala, Andre, *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1981).
- Berger, Guy, 1992. *Structural and Rural Development in third World* Review dalam *Economic Development and Cultural Change*, Vol. 44, No. 1, October 1995.
- Bryant, Coralie and White, Louise, G., 1987. *Managing Development In The Third World*, West View Press, Boulder Colorado.
- Chambers, Robert, 1987. *Pembangunan Desa, Mulai Dari Belakang*, Jakarta: LP3ES.
- Dillon, HS., dan Hermanto, 1993. *Kemiskinan di Negara Berkembang: Masalah Konseptual dan Global*, *Prisma* No.3 Th. XII/1993, LP3ES Jakarta hal. 11-21.
- Hanel Alfred, 2005. *Organisasi Koperasi. Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Organisasi Koperasi dan Kebijakan Pengembangan di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Haryadi, Dedi, et al., 1998. *Tahap Perkembangan Usaha Kecil, Dinamika dan Peta Potensi Pertumbuhan*. Bandung: Yayasan Akatiga.
- Hakim, Auza Djamil & Riana Panggabean, 2006. *Eksistensi Koperasi Perempuan di Indonesia*. Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK, Kementerian Negara Koperasi dan UKM.
- Kartasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES
- Korten, D.C., dan Sjahrir, 1988. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lewis, John P. dan Valerian Kallab (penyunting), 1987. *Mengkaji Ulang Strategi-strategi Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mishra, Ramesh and Honjo, M., 1981. *Changing Perception of Development Problems*, Maruzen, Asian, Hongkong.

Mudrajad Kuncoro, 2003. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Mubyarto & Edy Suandi Hamid, 1986. *Kredit Pedesaan di Indonesia*. (Yogyakarta: BFFE).

Nugroho, Iwan & Daiuri, Rochmin, 2004. *Pembangunan Wilayah, Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.

Suyanto, Bagong & Daru Priyambodo, "Bias Pelayanan: Lembaga Kredit Pedesaan", dalam *Prisma*, No. 11 tahun 1991.

Suyanto, Bagong & Emy Susanti, 1996. *Perempuan: Dari Subordinasi, Marginalisasi Menuju Pemberdayaan*. Surabaya: Airlangga University Press.

Suyanto, Bagong & Karnaji, 2005. *Kemiskinan dan Kesenjangan: Ketika Pembangunan Tak Berpihak Rakyat*. Surabaya: Airlangga University Press.

Sitorus, MT Felix, 1996. *Memahami dan Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia*. (Jakarta: Grasindo).

Sumodiningrat, Gunawan, 1999. *Pemberdayaan Masyarakat & JPS*. (Jakarta: Gramedia).

Seri Kajian Fiskal dan Moneter, 1992, *Pengentasan Kemiskinan Melalui Kredit Pedesaan*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Perpajakan dan Keuangan).

Yustika, Ahmad Erani, 2003. *Negara Vs Kaum Miskin*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wie, Thee Kian. 1981. *Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan, Beberapa Pendekatan Alternatif*. Jakarta: LP3ES.

Walsh, Thomas & Harry Wibowo (Penyunting), 2003. *Masih Adakah Alternatif di Ujung Krisis, Bunga Rampai Makalah Terpilih Konferensi INFID 2002*. Jakarta: INFID.

**LAMPIRAN 1:**  
**ARTIKEL ILMIAH**  
**Kebijakan Pengembangan Kopwan (Koperasi Wanita)**  
**dan Pemberdayaan Perempuan**  
**di Provinsi Jawa Timur**

**Latar Belakang**

Untuk memberi ruang dan meningkatkan potensi perempuan dalam aktivitas ekonomi dan sekaligus sebagai media bagi perempuan untuk beraktualisasi diri, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir telah memutuskan untuk memfasilitasi dan mendorong pengembangan koperasi yang khusus dikelola oleh perempuan, atau yang lazim disebut Koperasi Wanita (Kopwan). Meski di berbagai daerah disadari telah banyak lembaga keuangan mikro (LKM) yang eksis dan telah pula banyak melibatkan partisipasi kaum perempuan dalam pengelolaannya, namun dengan memastikan wadah yang lebih terlindungi secara hukum, yakni koperasi, diharapkan ruang gerak kaum perempuan dalam lembaga koperasi dan kiprah kaum perempuan dalam bidang ekonomi dapat lebih dipercepat dan diperluas.

Di tahun 2010, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mematok target penambahan Kopwan sekitar 125% dari rencana sebelumnya 2.000 unit menjadi 4.250 unit, dengan menghadirkan satu koperasi di setiap kelurahan dan desa. Secara kelembagaan, kenapa pemerintah berkomitmen untuk mendorong pengembangan Kopwan, karena selama ini dari 19.405 koperasi yang ada di Jawa Timur, ternyata hanya 3% yang dikelola wanita. Padahal, secara umum tingkat kesehatan koperasi yang dikelola perempuan cenderung lebih baik dibandingkan koperasi lainnya. Dengan maksud untuk memberi kesempatan kaum perempuan beraktualisasi dan sekaligus memberi wadah bagi upaya pengembangan UMKM, di era pemerintahan dua periode Pakde Karwo-Gus Ipul karena itu salah satu program unggulannya adalah mengembangkan Kopwan di berbagai daerah. Setelah dipastikan menjadi pemenang Pemilu untuk kedua kalinya, Pakde Karwo-Gus Ipul telah memastikan bahwa keberadaan dan perkembangan Kopwan akan tetap diprioritaskan sebagai mitra kerja UMKM dan media bagi upaya pemberdayaan kaum perempuan.

Dalam Petunjuk Teknis Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro melalui Koperasi Wanita (2010) yang dikeluarkan Dinas Koperasi dan UKM Jatim disebutkan secara garis besar tujuan pengembangan Kopwan adalah: Pertama, melalui koperasi, perempuan memiliki suatu wadah untuk mengelola dan memenuhi kebutuhan anggotanya, dalam hal ini perempuan itu sendiri. Kedua, melalui koperasi, perempuan dapat mewujudkan apa yang dicita-citakan, karena mereka tahu yang diinginkan dan memiliki kepentingan yang sama. Ketiga, melalui koperasi perempuan dapat menghasilkan sesuatu secara bersama-sama sehingga produktivitas akan meningkat. Keempat, melalui koperasi perempuan dapat meningkatkan taraf hidup keluarganya. Kelima, melalui koperasi perempuan memiliki akses lebih untuk mendapatkan fasilitas dan kemudahan.

Sebagai modal awal untuk memfasilitasi pengembangan Kopwan, Pemerintah Jawa Timur memberikan bantuan modal awal kepada setiap Kopwan sebesar 25 juta rupiah dari anggaran hibah APBD Jawa Timur. Dan, jika dalam perjalanannya terbukti berkembang akan diberi tambahan suntikan dana sebesar 25 juta rupiah. Sudah barang tentu, dengan telah diberikannya suntikan modal awal ini, pengelolaan Kopwan dalam perkembangan berikutnya diharapkan akan dapat berjalan dengan baik, tertib dan lancar. Di Provinsi Jawa Timur, secara keseluruhan pembentukan Kopwan kini telah mencapai minimal 8.750 unit. Pengembangan Kopwan ini adalah bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memberdayakan para pengusaha mikro sekaligus memerangi praktik *bank thithil* (penyaluran dana pinjaman dengan bunga tinggi).

Lebih dari sekadar usaha simpan-pinjam, kehadiran Kopwan selain diharapkan dapat dapat menjadi salah satu wadah yang sangat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga anggota Kopwan, dan media aktualisasi diri perempuan, sebagai salah satu lembaga keuangan mikro yang ada di tingkat bawah, kehadiran Kopwan juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi kerakyatan, mampu mengikis keberadaan rentenir, *bank thithil* dan tengkulak yang seringkali menetapkan suku bunga yang mencekik leher, dan sekaligus ikut berperan aktif dalam upaya penanganan kemiskinan di masyarakat sekitarnya.

Kajian sebagaimana dilaporkan selain bermaksud memetakan situasi problematik yang dihadapi Kopwan dalam pengelolaan usahanya, juga sekaligus bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas management pengelolaan Kopwan agar dapat maju dan mandiri. Secara rinci, permasalahan yang dikaji adalah:

1. Sebagai Lembaga Keuangan Mikro, kendala dan situasi problematik apa sajakah yang dihadapi Kopwan dalam pengembangan dan pengelolaan modal usahanya?
2. Bagaimana gambaran tentang mekanisme yang dikembangkan Kopwan di Jawa Timur dalam manajemen pengelolaan keuangan, aspek administrasi, produksi dan aspek pemasarannya?
3. Sejauhmana keberadaan Kopwan di Jawa Timur mampu berperan dalam memenuhi kebutuhan sosial anggotanya, meningkatkan tingkat kesejahteraan anggota serta masyarakat di sekitarnya? Termasuk di sini, sejauhmana kehadiran Kopwan telah berperan sebagai media aktualisasi diri peran dan potensi perempuan?
4. Sejauhmana kehadiran Kopwan di Jawa Timur telah mampu mendorong pertumbuhan usaha ekonomi kerakyatan di wilayahnya? Termasuk di sini, sejauhmana Kopwan mampu mandiri, bersaing dan menggantikan peran lembaga perkreditan informal yang acapkali merugikan masyarakat, seperti rentenir, *bank thithil* dan pengijon?

### Kerangka Teori

Dari beberapa hasil studi kasus tentang koperasi memperlihatkan bahwa keberadaan koperasi tidak saja menguntungkan pada anggota koperasi, tetapi juga telah berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik untuk komunitas di mana koperasi tersebut berada. Keberadaan dan perkembangan koperasi khususnya koperasi yang dikelola perempuan di Indonesia cukup menarik perhatian pemerintah maupun para pembina karena koperasi-koperasi tersebut

menunjukkan perkembangan kinerja yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari sisi organisasi maupun usaha (Hakim & Panggabean, 2006).

Keberadaan dan keberhasilan koperasi tidak dapat dilepaskan dari konsep kepercayaan (*trust*) dari anggota kepada Pengurus dan sebaliknya. Dalam hal ini ada prinsip hubungan timbal balik dalam arti materi atau inmateri, juga menunjuk pada hubungan pertukaran yang sebetulnya terbentang mulai dari yang paling tidak jelas pengukurannya sampai dengan jelas pengukurannya, mulai dari yang langsung sampai ke yang tidak langsung (Lawang R, 2006). Dalam hal ini kepercayaan antara koperasi dengan anggotanya terbangun jika kedua belah pihak saling memenuhi ekspektasi dari keduanya. Anggota akan percaya terhadap koperasi jika koperasi mampu memenuhi ekspektasi kebutuhan anggotanya melalui mekanisme yang memenuhi prinsip-prinsip perkoperasian yang menjadi kesepakatan. Dengan kata lain bahwa koperasi akan dipercaya oleh anggotanya jika harapan-harapan anggotanya dapat dipenuhi tanpa membedakan apa pun, termasuk perbedaan jenis kelamin. Sebaliknya koperasi ada, bertahan dan berkembang jika anggotanya memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Menurut Soebyakto (2005), di Indonesia pembangunan koperasi selama ini dikembangkan dan dirancang melewati 3 (tiga) tahapan utama. Pertama, tahap ofisialisasi, yakni tahap "penumbuhan kesadaran" pada penduduk Indonesia tentang pentingnya berusaha dan keluar dari lingkaran kemiskinan di mana pemerintah akan berusaha membantu dengan menyalurkan sumber-sumber ekonomi (modal, kemampuan, dan sebagainya) sehingga mereka bisa menjadi potensi ekonomi untuk koperasi. Kedua, tahap deofisialisasi, yakni tahap di mana kesadaran masyarakat telah tumbuh dan semangat koperasi sudah terbentuk, maka pemerintah akan mulai mundur dari kopcrasi pada tahap ini. Ketiga, tahap otonomi, yakni tahap yang ditandai dengan munculnya kemandirian koperasi Indonesia, di mana keterlibatan pemerintah benar-benar telah keluar sama sekali, karena koperasi yang ada telah mampu maju dan mandiri tanpa harus tergantung kepada intervensi aau bantuan dari pemerintah.

Untuk saat ini, meski perkembangan koperasi di Indonesia sudah tergolong cukup maju dan meluas, namun harus diakui eksistensi koperasi tidak mungkin berdiri sendiri tanpa hubungan dengan pihak lain (usaha negara maupun swasta). Secara internal, koperasi sangat membutuhkan kerjasama dengan pihak-pihak lain itu karena keterbatasan kemampuan dalam hal manajemen, pengelolaan sumber daya, serta sumber-sumber kemampuan lainnya (seperti modal dan teknologi). Secara eksternal, globalisasi sudah terlanjur berjalan, sehingga koperasi perlu menjalin kemitraan dengan pemerintah (BUMN) dan swasta, sehingga dalam berusaha "persaingan bebas yang sehat" antar pelaku ekonomi ini bisa terjamin.

Dari hasil pemetaan yang dilakukan para ahli, dewasa ini terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan koperasi, antara lain sebagai berikut: rendahnya produktifitas diakibatkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia koperasi, khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi dan pemasaran, serta rendahnya kompetensi kewirausahaan koperasi, terbatasnya akses koperasi kepada sumber daya produktif terutama terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pemasaran; masih rendahnya kinerja; serta kurang kondusifnya iklim usaha.

Bagi kaum perempuan miskin, kehadiran koperasi memiliki peran yang positif. Kehadiran dan perkembangan koperasi, bukan saja terbukti menjadi media bagi

perempuan untuk mengembangkan potensinya, tetapi juga sekaligus menjadi media sosial bagi perempuan untuk ruang beraktualisasi diri. Koperasi menciptakan peluang bagi perempuan untuk membantu diri sendiri. Lebih dari 800 juta orang di seluruh dunia sudah menjadi anggota koperasi. Meskipun koperasi lebih memberi fokus untuk memenuhi kebutuhan lokal para anggotanya, mereka juga bekerjasama dan terkait secara global. Mereka sama-sama mendukung dan mempraktekkan nilai maupun prinsip yang terkandung dalam ICIS (Pernyataan Internasional tentang Jatidiri Koperasi). Basis demokrasi dan kombinasi tujuan sosial ekonomi yang unik menempatkan koperasi sebagai lembaga ideal yang berperan untuk meningkatkan kelayakan globalisasi. Sesuatu yang telah mereka praktekkan selama beberapa generasi. Dalam banyak hal koperasi adalah cermin dan lebih menampilkan wajah kemanusiaan dari globalisasi yang mementingkan uang dan modal semata-mata (Ismangil, 2007). Bukan tidak mungkin untuk menghadapi era persaingan pasar bebas pengembangan peran perempuan melalui koperasi perempuan (kopwan), akan menjadi salah satu titik balik yang menjadikan era globalisasi sebagai pembukaan kesempatan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menunjukkan eksistensi dalam kancah perekonomian dunia.

### Metode Penelitian

Lokasi kajian, ditetapkan di dua daerah, yaitu Kabupaten Tuban dan Kabupaten Malang. Lokasi penelitian di Kabupaten Tuban, ditetapkan di tiga wilayah Kecamatan, yaitu: (1) Kecamatan Tuban; (2) Kecamatan Kerek; dan (3) Kecamatan Merak Urak. Kecamatan Tuban, tepatnya di Kelurahan Latsari yang terletak di Kota Tuban, merepresentasikan daerah perkotaan, Kecamatan Kerek, diasumsikan menjadi representasi wilayah pedesaan, dan memang di wilayah ini sebagian besar masyarakatnya bermatapencarian sebagai petani dan pengrajin Batik Gedhok Tuban, dan Kecamatan Merak Urak, menjadi representasi wilayah transisi, yaitu wilayah yang berada di perbatasan Kota Tuban dengan wilayah pedesaan yang di dominasi oleh tanah ladang dan lahan pertanian.

Sedangkan di Kabupaten Malang, lokasi penelitian dilakukan di dua kecamatan, yaitu: (1) Kecamatan Singosari dan (2) Kecamatan Karangploso. Pemilihan kedua kecamatan tersebut didasarkan atas keberadaan dua buah koperasi wanita yang sudah lebih dulu ada, sebelum Pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan program Pendirian dan pengucuran dana bantuan untuk Koperasi Wanita (Kopwan) di seluruh kelurahan/desa di Jawa Timur. Koperasi Wanita-Wanita Mandiri di Kecamatan Karangploso, dan Koperasi Wanita-Kartini Mandiri yang ada di Kecamatan Singosari itu diambil sebagai kasus dalam penelitian ini karena kedua koperasi wanita itu mampu bertahan cukup lama, dan pendiriannya tanpa campur tangan pemerintah, sehingga pengalaman yang di miliki para pengurus di kedua koperasi itu dapat menjadi pembandingan yang cukup bermakna bagi pengembangan koperasi-koperasi wanita yang ada di berbagai desa/kelurahan yang tersebar di seluruh wilayah di Jawa Timur yang dibentuk pemerintah.

Di masing-masing kabupaten, sejumlah rara sumber atau informan yang terlibat langsung sebagai pengurus dalam pengelolaan Kopwan (Ketua, Bendahara dan Sekretaris) diwawancarai secara mendalam (*in depth*). Wawancara kepada pengurus Kopwan dilakukan dengan dipandu *interview guide* yang telah dipersiapkan sebelumnya. Fokus atau ruang lingkup dari kajian yang dilakukan dibatasi pada berbagai persoalan

yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, kelembagaan, aspek sumber daya manusia, administrasi dan keuangan, produksi dan pemasaran Kopwan di Jawa Timur.

Wawancara kepada pengurus Kopwan akan dilakukan dengan dipandu *interview guide* yang telah dipersiapkan sebelumnya. Fokus atau ruang lingkup dari kajian yang dilakukan dibatasi pada berbagai persoalan yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, kelembagaan, aspek sumber daya manusia, administrasi dan keuangan, produksi dan pemasaran Kopwan di Jawa Timur. Persoalan utama yang digali dari para informan, khususnya pengurus Kopwan Jatim adalah kendala-kendala atau problema yang mereka hadapi di tahap awal proses pengembangan Kopwan, dan bagaimana mekanisme pengelolaan modal kerja yang dikembangkan selama ini.

Sementara itu, wawancara dengan anggota Kopwan, yakni kaum perempuan miskin yang pernah memperoleh pinjaman modal usaha dari Kopwan difokuskan pada riwayat perkembangan usaha, kendala-kendala yang mereka alami dalam upaya pengembangan usaha yang ditekuni, dan sejauhmana modal dari Kopwan terbukti fungsional mendukung upaya pengembangan usaha mereka.

### **Temuan dan Analisis Data**

Kopwan adalah salah satu lembaga sosial-ekonomi yang secara terencana didorong perkembangannya di Provinsi Jawa Timur dengan tujuan untuk memberi ruang bagi kiprah kaum perempuan dan sekaligus sebagai wadah untuk membantu kaum perempuan (anggota Kopwan) untuk memberdayakan usaha dan tingkat kesejahteraan mereka melalui penyaluran bantuan pinjaman modal usaha berbunga murah. Meski ada banyak kemajuan telah berhasil dicapai pasca dikembangkan Kopwan di berbagai daerah, tetapi secara objektif harus diakui masih ada banyak hal yang perlu dibenahi dan diperhatikan sehubungan dengan kinerja Kopwan di berbagai daerah.

Sebagai lembaga keuangan mikro, faktor yang acapkali menghambat kinerja Kopwan dalam mendukung pengembangan UMKM dan upaya peningkatan kesejahteraan anggotanya di satu sisi adalah keterbatasan modal usaha yang dimiliki dan di sisi lain cara kerja rentenir atau pelepas uang lair yang umumnya sangat fleksibel, dan bersikap pro-aktif menjemput bola langsung mendatangi masyarakat ke rumah atau ke tempat kerja mereka. Meski sebagai modal awal dan tambahan modal selama ini Kopwan telah memperoleh kucuran dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, namun karena anggota yang harus dilayani dan yang membutuhkan bantuan pinjaman modal usaha jauh lebih besar jumlahnya, maka modal yang ada dan daya jangkauan layanan Kopwan tetap saja masih belum memadai. Sejumlah informan yang diwawancarai menyatakan bahwa dengan adanya Kopwan sesungguhnya bagi sebagian kaum perempuan miskin telah terbukti memberikan banyak manfaat karena besar suku pinjaman yang ditawarkan jauh lebih murah atau lebih rendah daripada rentenir, *bank thithil* atau pelepas uang informal lainnya. Tetapi, sekali lagi karena modal yang dimiliki terbatas, seringkali anggota Kopwan yang tidak kebagian memperoleh pinjaman modal dari Kopwan terpaksa meminjam ke rentenir karena adanya kebutuhan dana yang tidak bisa ditunda. Menurut informasi, dalam setahun diperkirakan Kopwan rata-rata hanya bisa melayani sekitar 50-70 anggota, padahal jumlah penduduk miskin dan kaum perempuan anggota Kopwan yang membutuhkan pinjaman jauh lebih banyak dari itu.

Studi ini menemukan, manajemen pengelolaan keuangan Kopwan seringkali dihadapkan pada dilema antara mendahulukan efisiensi atau memilih lebih



mendahulukan efektivitas pencapaian tujuan pendirian Kopwan. Dari informasi yang diperoleh di lapangan, sering terjadi pengurus Kopwan pada akhirnya lebih memilih mengembangkan pola pengelolaan yang mengedepankan efisiensi, yaitu memberikan pinjaman kepada anggota yang dinilai bisa memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan menunggak cicilan pinjaman daripada memberikan pinjaman kepada anggota Kopwan yang dinilai riskan menunggak pembayaran cicilan pinjaman. Kekhawatiran akan terjadi tunggakan pembayaran cicilan yang ujung-ujungnya akan menyebabkan modal Kopwan berkurang adalah salah satu ketakutan terbesar yang menghantui pengurus Kopwan, sehingga bagi anggota yang membutuhkan tetapi miskin dan rawan menunggak cicilan akhirnya dengan terpaksa dinomorduakan. Di sisi yang lain, dalam rangka mendorong perkembangan Kopwan para pengurus sebetulnya berkepentingan untuk terus menambah jumlah anggota. Namun demikian, para pengurus sendiri acapkali menghadapi situasi dilematis antara menambah jumlah anggota dengan konsekuensi anggota yang ada sebelumnya tidak memperoleh giliran/kesempatan untuk meminjam lagi ke Kopwan, atau tetap mempertahankan jumlah anggota yang lama, tetapi dengan konsekuensi lembaga tersebut tidak cepat berkembang. Dengan modal yang terbatas, salah satu tantangan yang dihadapi Kopwan adalah bagaimana mereka mampu memberi pinjaman modal usaha kepada seluruh anggota secara merata.

Bagi kaum perempuan di pedesaan kehadiran dan pendirian Kopwan di berbagai daerah, dalam batas-batas tertentu memang telah terbukti menjadi media yang fungsional bagi mereka untuk beraktualisasi diri di luar ranah domestik. Menjadi pengurus Kopwan, misalnya bagi sebagian kaum perempuan merupakan bentuk komitmen sekaligus kiprah mereka untuk beraktualisasi di ruang publik. Sementara itu, bagi kaum perempuan yang menjadi anggota Kopwan, kehadiran lembaga ini sedikit-banyak diakui juga telah merangsang tumbuhnya keterlibatan dan keberdayaan perempuan sebagai salah satu tiang penyangga ekonomi keluarga melalui berbagai kegiatan ekonomi kerakyatan yang mereka kembangkan berkat dukungan modal usaha dari Kopwan. Meski tidak semua pinjaman dari Kopwan dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, tetapi bagi kebanyakan anggota Kopwan yang memperoleh bantuan pinjaman modal dari Kopwan, mereka cenderung memanfaatkan pinjaman itu untuk memperbesar usaha yang ditekuni atau berusaha mengembangkan usaha baru yang bisa dijadikan sumber tambahan penghasilan bagi keluarga mereka.

Nilai lebih dan sekaligus keuntungan meminjam ke Kopwan adalah karena lembaga ini dinilai memiliki mekanisme kerja yang nyaris sama dengan lembaga kredit informal, tetapi dari segi beban suku bunga yang harus ditanggung jauh lebih ringan daripada jika masyarakat meminjam ke rentenir yang acapkali mematok beban suku bunga yang tinggi. Yang menjadi masalah sekarang: meski pun prosedur meminjam ke Kopwan dinilai mudah dan suku bunga pinjaman juga relatif kecil, tetapi pinjaman modal usaha yang diperoleh kaum perempuan dari Kopwan umumnya belum berperan optimal dalam mendukung upaya pengembangan kegiatan ekonomi kerakyatan. Selain sebagian pinjaman acapkali dimanfaatkan untuk kegiatan yang sifatnya konsumtif, tidak jarang terjadi anggota Kopwan yang memperoleh pinjaman modal usaha mengalami proses pengikisan modal karena usaha yang ditekuni berjalan stagnan, bahkan mengalami kemunduran. Sejumlah informan menuturkan bahwa di tengah iklim persaingan usaha yang makin ketat, prospek perkembangan UMKM cenderung terbatas, bahkan tak kuat

bertahan hidup ketika harus menghadapi iklim yang makin kompetitif dan serbuan produk impor yang murah.

### Saran

Upaya memberdayakan kaum perempuan, mendorong perkembangan kegiatan ekonomi kerakyatan, dan sekaligus mengembangkan kinerja Kopwan pada dasarnya adalah satu paket program yang seyogianya dilakukan secara terpadu. Berikut sejumlah saran yang perlu diperhatikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kinerja Kopwan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi kendala keterbatasan modal, selain menggandaikan diri pada dukungan kucuran dana dari pemerintah, para pengurus Kopwan sebaiknya juga menjajagi sumber-sumber dana lain yang potensial, semisal dari program CSR, program *Community Development* dari berbagai BUMN dan lain-lain --termasuk dukungan dana swamandiri-- dari masyarakat yang menjadi anggota Kopwan agar dapat diperluass daya jangkau layanan Kopwan untuk memberi pinjaman modal usaha bagi anggotanya secara merata dan berkelanjutan. Sudah barang tentu, untuk memastikan agar dukungan dan bantuan tambahan modal usaha bagi Kopwan tidak salah arah, perlu dilakukan audit dan kontrol yang benar-benar ketat agar dapat dicegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan pemanfaatan dana Kopwan.
2. Para pengurus Kopwan secara umum masih sangat membutuhkan pelatihan-pelatihan dan pendampingan yang berkaitan dengan perbaikan pengelolaan atau manajemen pengelolaan koperasi secara professional. Kopwan idealnya dikelola secara sistematis, efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Manajemen yang profesional juga sekaligus dapat menjadi bekal kopwan bersaing dengan lembaga-lembaga sejenisnya. Di samping itu, Kopwan secara umum juga masih sangat membutuhkan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan usaha sehingga kopwan dapat meningkatkan kinerjanya dan memperbesar keuntungan bagi anggotanya. Pengembangan usaha untuk kopwan idealnya tidak saja dikaitkan dengan kebutuhan peran perempuan (*domestic*) tetapi juga idealnya dikaitkan dengan pengembangan potensi produktif anggota kopwan yang bermanfaat dalam memperkuat penyangga ekonomi keluarga sekaligus media bagi perempuan melakukan aktualisasi diri. Di berbagai daerah, acalah langkah yang strategis dan ideal, jika untuk mempermudah akses pengurus Kopwan dan anggota Kopwan melakukan konsultasi tentang manajemen dan sekaligus upaya pengembangan kegiatan produktif, di tiap-tiap kecamatan kemudian dapat didirikan Klinik Konsultasi Kopwan yang melayani kebutuhan dan sekaligus memfasilitasi upaya pengembangan Kopwan dan kegiatan wirausaha kaum perempuan di berbagai daerah. Untuk tahap awal pembinaan, proses pembinaan Kopwan memang bisa dilakukan dengan cara bekerjasama dengan Kopwan-Kopwan yang sudah terbukti eksis, seperti Fuskowanjati. Tetapi, untuk jangka panjang ada baiknya jika pembinaan yang berkelanjutan dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan Kopwan itu sendiri, yaitu melalui pendirian Klinik Kopwan di masing-masing kecamatan.
3. Ke depan, peran strategis Kopwan yang perlu dikembangkan, antara lain meliputi: (1) sebagai lembaga substitutif untuk bersaing, dan bahkan mengganti peran

lembaga perkreditan informal yang acapkali merugikan masyarakat karena membebani mereka dengan suku bunga yang mencekik leher, (2) sebagai lembaga pendukung perkembangan kegiatan ekonomi kerakyatan, dan (3) sebagai wadah bagi upaya pemberdayaan peran perempuan. Ketiga peran utama Kopwan ini, perlu memperoleh perhatian khusus agar dapat dijamin konsistensi dan keterpaduan dalam proses perkembangan Kopwan di berbagai daerah.

4. Dalam proses pembinaan dan pendampingan yang diberikan kepada para pengurus Kopwan di berbagai daerah seyogianya tidak hanya pendampingan untuk kepentingan perbaikan administrasi dan manajemen lembaga, tetapi juga pendampingan dalam rangka mendorong dan memfasilitasi pengembangan usaha produktif dari para anggota Kopwan agar kegiatan usaha yang dikembangkan Kopwan tidak hanya dalam bentuk simpan-pinjam, melainkan bisa pula dikembangkan untuk berbagai kegiatan produktif yang lain. Dengan kata lain, dalam rangka memperbesar modal kerja yang dimiliki, para pengurus Kopwan seyogianya tidak hanya mengantungkan pada usaha simpan-pinjam saja, tetapi perlu mengembangkan diversifikasi usaha ke berbagai bidang yang lain, yang menguntungkan, tanpa harus keluar dari koridor tujuan sosial pendirian koperasi. Dalam hal ini, para pengurus Kopwan ada baiknya jika menjajagi kerjasama dengan lembaga lain, seperti KUD, dan lain-lain untuk memluas bidang usaha yang ditekuni demi meningkatkan kesejahteraan anggota Kopwan. Bidang-bidang usaha yang potensial di berbagai daerah perlu diidentifikasi dan menjadi lahan garapan Kopwan agar eksistensi Kopwan tidak melulu tergantung kepada dukungan bantuan modal usaha dari pemerintah saja, tetapi mampu secara mandiri mencapai tambahan modal usaha melalui kegiatan-kegiatan produktif lain yang menguntungkan.
5. Sesuai dengan isi Undang-Undang Koperasi yang terbaru, perkembangan koperasi ke depan --tak terkecuali Kopwan-- diharapkan mengacu pada pengembangan salah satu bidang, yaitu produksi, konsumsi, jasa pelayanan dan jasa simpan-pinjam. Mulai saat ini, untuk menjamin kontinuitas perkembangan Kopwan di Jawa Timur seyogianya mulai dikondisikan untuk memilih salah satu bidang pengembangan, dan segera dilakukan pelatihan bagi pengurus Kopwan sesuai dengan bidang pengembangan koperasi yang dipilih. Pelatihan ini perlu segera dilakukan untuk membantu proses persiapan pengembangan Kopwan yang lebih spesifik, sesuai dengan kompetensi dan pilihan pengurus Kopwan itu sendiri. Berbeda dengan lembaga keuangan lain yang belum berbentuk koperasi, Kopwan adalah lembaga resmi yang berkembang dan dikembangkan dengan mengacu pada Undang-Undang Koperasi dan berbagai peraturan yang ada, sehingga agar tidak terjadi salah urus dalam perkembangan Kopwan ke depan, maka sejak awal perlu dipersiap SDM-SDM pengurus Kopwan yang benar-benar memahami ke mana mereka bakal berkembang di masa depan.

## Daftar Pustaka

Afinan, Ricardi S., 2009. "Kekuatan Kapital-Kapital Kelembagaan: Belajar Dari Dua Koperasi Sukses", dalam: *Jurnal Sosiologi Masyarakat* Vol. 15 No. 1, Januari 2009.

- Bayo Ala, Andre, *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1981).
- Berger, Guy, 1992. *Structural and Rural Development in the Third World* Review dalam *Economic Development and Cultural Change*, Vol. 44, No. 1, October 1995.
- Bryant, Coralie and White, Louise, G., 1987. *Managing Development In The Third World*, West View Press, Boulder Colorado.
- Chambers, Robert, 1987. *Pembangunan Desa, Mulai Dari Belakang*, Jakarta: LP3ES.
- Dillon, HS., dan Hermanto, 1993. *Kemiskinan di Negara Berkembang: Masalah Konseptual dan Global*, *Prisma* No.3 Th. XII/1993, LP3ES Jakarta hal. 11-21.
- Hanel Alfred, 2005. *Organisasi Koperasi. Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Organisasi Koperasi dan Kebijakan Pengembangan di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Haryadi, Dedi, et al., 1998. *Tahap Perkembangan Usaha Kecil, Dinamika dan Peta Potensi Pertumbuhan*. Bandung: Yayasan Akatiga.
- Hakim, Auza Djamil & Riana Panggabean, 2006. *Eksistensi Koperasi Perempuan di Indonesia*. Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK, Kementerian Negara Koperasi dan UKM.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES
- Korten, D.C., dan Sjahrir, 1988. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lewis, John P. dan Valerian Kallab (penyunting), 1987. *Mengkaji Ulang Strategi-strategi Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mishra, Ramesh and Honjo, M., 1981. *Changing Perception of Development Problems*, Maruzen, Asian, Hongkong.
- Mudrajad Kuncoro, 2003. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mubyarto & Edy Suandi Hamid, 1986. *Kredit Pedesaan di Indonesia*. (Yogyakarta: BPFE).
- Nugroho, Iwan & Dahuri, Rochmin, 2004. *Pembangunan Wilayah, Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.

Suyanto, Bagong & Daru Priyambodo, "Bias Pelayanan: Lembaga Kredit Pedesaan", dalam *Prisma*, No. 11 tahun 1991.

Suyanto, Bagong & Emy Susanti, 1996. *Perempuan: Dari Subordinasi, Marginalisasi Menuju Pemberdayaan*. Surabaya: Airlangga University Press.

Suyanto, Bagong & Karnaji, 2005. *Kemiskinan dan Kesenjangan: Ketika Pembangunan Tak Berpihak Rakyat*. Surabaya: Airlangga University Press.

Sitorus, MT Felix, 1996. *Memahami dan Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia*. (Jakarta: Grasindo).

Sumodiningrat, Gunawan, 1999. *Pemberdayaan Masyarakat & JPS*. (Jakarta: Gramedia).

Seri Kajian Fiskal dan Moneter, 1992, *Pengentasan Kemiskinan Melalui Kredit Pedesaan*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Perpajakan dan Keuangan).

Yustika, Ahmad Erani, 2003. *Negara Vs Kaum Miskin*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wie, Thee Kian. 1981. *Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan, Beberapa Pendekatan Alternatif*. Jakarta: LP3ES.

Walsh, Thomas & Harry Wibowo (Penyunting), 2003. *Masih Adakah Alternatif di Ujung Krisis, Bunga Rampai Makalah Terpilih Konferensi INFID 2002*. Jakarta: INFID.

## **LAMPIRAN 2: Personalia Penelitian dan Kualifikasinya**

### **1. Ketua Peneliti**

- a. Nama Lengkap : Dr. Tuti Budirahayu
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. NIP : 196805121992032002
- d. Disiplin ilmu : Sosiologi
- e. Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I/III-D
- f. Jabatan fungsional/struktural: Lektor
- g. Fakultas/Jurusan : FISIP
- h. Waktu penelitian : 15 jam/minggu

### **2. Anggota Peneliti**

- a. Nama Lengkap : Dra. Sutinah, MS
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. NIP : 195808161982032001
- d. Disiplin ilmu : Sosiologi Gender
- e. Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/IV-C
- f. Jabatan fungsional/struktural: Lektor Kepala
- g. Fakultas/Jurusan : FISIP
- h. Waktu penelitian : 12 jam/minggu

**CURRICULUM VITAE****I. Identitas**

1. Nama lengkap : Dr. Tuti Budirahayu  
 2. NIP : 196805121992032002  
 3. Pangkat/Golongan : Lektor/ III D  
 4. Tempat & tgl. Lahir : Jakarta, 12 Mei 1968  
 5. Agama : Islam  
 6. Alamat Rumah : Sidosermo PDK 5A/kav.44, Surabaya,  
60239  
 7. Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
 8. Program Studi : Sosiologi  
 9. Telepon Kantor : 031-5034015  
 Rumah : 031-8499774 Fax: 031-8475982  
 Ponsel : 0811-324450  
 10. E-mail : tutibudirahayu@yahoo.com

**II. Riwayat pendidikan tinggi :**

No	Strata	Gelar	Institusi	Bidang	Lulus Tahun
1.	S-1	Dra.	FISIP Universitas Airlangga	Sosiologi	1991
2.	S-2	Msi.	Pasca Sarjana Universitas Indonesia	Sosiologi	1998
3.	S-3	Dr	Pascasarjana UGM	Sosiologi	2013

**III. Kursus/Pelatihan :**

No	Macam Kursus/Pelatihan	Status	Tempat/Penyelenggara	Tahun
1.	Pelatihan Program Pendekatan Terapan/Applied Approach (AA)	Peserta	Surabaya, P4 Universitas Airlangga	1999
2.	Pelatihan Analisis Gender dan Hak Azasi Manusia	Peserta	Surabaya, Pusat Studi Wanita, Lembaga Penelitian Unair	2001
3.	Kursus Metodologi Penelitian Kualitatif dan <i>The Ethnograph</i>	Panitia	Surabaya, FISIP Unair	2001
4.	Pelatihan Metode Penelitian Kualitatif	Peserta	Jakarta, UNICEF	2001

	untuk Analisis Situasi Ibu dan Anak			
5.	Pelatihan Karya Tulis Ilmiah /Jurnal Ilmiah	Peserta	Surabaya, Jurusan Antropologi Universitas Indonesia dan The Toyota Foundation	2002
6.	Workshop Poverty Research Competition	Peserta	Kantor Perwakilan Bank Dunia Jakarta	2004
7.	Workshop Penulisan dan Penerbitan Buku Ajar Perguruan Tinggi	Peserta	Airlangga University Press, Universitas Airlangga, Surabaya	2008

#### IV. Pengalaman Penelitian :

No	Tahun	Judul Penelitian	Asal Dana	Keterangan
1.	1993	Proses Sosialisasi dan Interaksi Sosial yang Terjadi di Sekolah dan Hubungannya dengan Terbentuknya Modernitas Siswa	DIP/OPF Unair	Ketua Peneliti
2.	1994	Studi Kelayakan Pemakaian Briket Batu Bara pada Industri Kecil dan Rumah-rumahan di Wilayah Jawa Timur	PT. Bukit Asam	Team Leader
3.	1994	Profil Keluarga Sejahtera dan Pra Sejahtera di Daerah Pertanian dan Nelayan Jawa Timur	ISI dan BKKBN	Anggota peneliti
4.	1998	Rencana Siswa SMU untuk Melanjutkan Pendidikan ke Jenjang yang Lebih Tinggi	TMPD	Ketua Peneliti
6.	2000	Analisis Tentang Peran Lembaga Pendidikan Pra Sekolah pada Pencapaian Prestasi Belajar Anak-anak di Sekolah Dasar	DIP UNAIR	Ketua Peneliti
7.	2000	Studi Tentang Penyusunan Model Organisasi Usaha Kecil yang Inovatif dalam Upaya Memberdayakan Industri Kecil	DIK Suplemen UNAIR	Ketua Peneliti
8.	2000	Peran Sera Lembaga Non Pemerintah dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di Bidang Pelayanan	BALIT-BANGDA Jawa Timur	Anggota Peneliti
9.	2001	Studi Tentang Pola Pemilihan Jurusan Di Perguruan Tinggi yang Dikaitkan dengan Rencana Pilihan Pekerjaan pada Siswa-siswa SMU	DIK Suplemen UNAIR	Ketua Peneliti
10.	2001	Mengidentifikasi penyebab Kematian Ibu dan Merumuskan Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate) pada Masyarakat nelayan	DIK Rutin UNAIR	Anggota peneliti
11.	2001	Kajian Dinamika Sosial: Studi tentang Integrasi dan Wacana Pluralitas dalam Masyarakat Transisional	MEN-RISTEK	Anggota peneliti



12.	2001	Studi UKL dan UPL untuk PT. Premier Oil di Ujung Pangkah, Gresik	PT.Premier Oil	Anggota Peneliti
13.	2001	<i>Rapid Qualitative Assessment</i> untuk Analisis Situasi Ibu dan Anak di Lima Kabupaten di Jawa Timur	UNICEF	Anggota Peneliti
14.	2002	Studi Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kota Batu, Jawa Timur	BAPKO Batu	Anggota Peneliti
15.	2002	Analisis Model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Tingkat Sekolah Dasar dalam Upaya Mewujudkan Pengelolaan Sekolah yang Otonom	Lemlit Unair	Ketua Peneliti
16.	2003	Kajian tentang Penanganan Keluarga Miskin Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Era Otonomi Daerah	Dinas Sosial Prop. Jawa Timur dan FISIP Unair	Anggota Peneliti
17.	2003	Efektivitas Peran Peer Educator di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah dalam Menanggulangi Resiko Reproduksi Remaja	Lemlit Unair	Ketua Peneliti
18.	2004	Migrasi Internasional Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Asal Jawa Timur: Studi tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan TKI di Luar Negeri	Lemlit Unair & Dept. Tenaga Kerja-Transmigrasi	Anggota Peneliti
19.	2005	Fenomena Globalisasi Pendidikan di Indonesia: Tinjauan Kritis Pada Sekolah-Sekolah Berwawasan Internasional	LPPM Unair	Ketua Peneliti
20.	2005	Memetakan Perilaku Korupsi: Struktur ataukah Kultur	LPPM Unair	Anggota Peneliti

#### V. Tulisan yang dipublikasikan :

Tahun	Judul Tulisan	Media Publikasi	Author/ Co-Author
1999	"Aspirasi Siswa SMU dan Orang Tuanya tentang Pendidikan dan Pekerjaan"	Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, tahun XII nomor 3	Author
2000	"Studi Korelasi Tentang Prestasi Akademis Siswa di Sekolah Dasar yang Dikaitkan dengan Latar Belakang Keluarga dan Pengalaman Belajar Siswa Sebelum Masuk Sekolah"	Jurnal Wacana Pendidikan Sekolah Dasar, Vol.1, no.1	Author

2000	"Masih Perlu Profesionalisme bagi Guru Sekolah Dasar? (Menyongsong Otonomi Pendidikan Daerah di Bidang Pendidikan)",	Jurnal Wacana Pendidikan Sekolah Dasar, Vol.1, no. 3	Author
2002	"Menggagas Model Pendidikan Alternatif Yang Dialogis untuk Anak-Anak Jalanan"	HAKIKI, Vol. 3	Author
2004	Buku Sosiologi Untuk SMA	Surabaya Intellectual Club	Author
2004	"Kritik terhadap Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah dalam Menyongsong Otonomi Pendidikan "	Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, tahun XVII nomo 3	Author
2006	Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan	Kencana Prenada Media Group	Co-Author
2008	Fenomena Globalisasi Pendidikan di Indonesia: Tinjauan Kritis pada Sekolah-Sekolah Berwawasan Internasional	Jurnal Penelitian Dinamika Sosial, Vol.7, No.3, Desember 2008	Author
2008	Buku Materi Pokok Sosiologi Korupsi untuk Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Terbuka	Pusat Penerbitan Universitas Terbuka	Author
2009	Menuju Pendidikan Yang Berkeadilan Sosial	Literasi: Jurnal Reformasi Pendidikan, Vol.1, No.2, Juli 2009	Author

#### VII. Seminar / Presentasi :

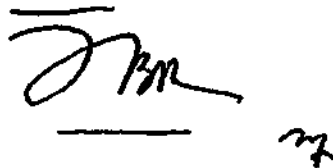
1. Menjadi pembicara pada Workshop dengan tema: Pendidikan sebagai suatu Transformasi Sosial yang Berwawasan Gender di tingkat Sekolah Dasar, diselenggarakan oleh Pusat Studi Wanita Universitas Airlangga, 15 Mei 2002.
2. Menjadi pembicara pada Seminar, dengan tema: Strategi Pendidikan Indonesia Masa Depan dalam Menghadapi Kompetisi Ekonomi Global, diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, 18 Mei 2002.
3. Menjadi tutor pada Workshop dengan tema: Studi Sosiologi untuk Guru-Guru SMU, diselenggarakan oleh Pusat Penataran Ilmu-Ilmu Sosial untuk Guru-Guru SMU, Departemen Pendidikan Nasional, 15 Oktober 2002.

4. Menjadi pembicara pada Seminar: Pendidikan Guru Sejahtera, Masa Depan Cerah, yang diselenggarakan oleh Jaringan Sekolah Islam Terpadu, 23 Juni 2007

**VIII. Lain-Lain :**

- Pernah menjadi Konsultan Propinsi untuk UNICEF pada tahun 2001 dalam Studi *Rapid Qualitative Assesment* tentang Analisis Situasi Ibu dan Anak di lima Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
- Pernah menjadi Konsultan Propinsi untuk UNICEF pada tahun 2002 untuk kegiatan Monitoring dan Evaluasi Lima Program di Enam kabupaten/kota di Jawa Timur.
- Aktif mengajar dalam bidang studi: Sosiologi Pendidikan, Statistik Sosial, Metodologi Penelitian Sosial, Sosiologi Perilaku Menyimpangan dan Sosiologi Korupsi
- Memperoleh penghargaan (*prize*) dari World Bank perwakilan Jakarta dalam kompetisi penulisan proposal *Poverty Research Competition* putaran I, pada tahun 2004

Surabaya, 1 Pebruari 2013



Dr. Tuti Budirahayu

**CURRICULUM VITAE**

1. Nama : Dra. Sutinah, MS
2. NIP : 19580816 198203 2 001/131 125 985
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat/Tanggal lahir : Kulon Progo, DIY, 16 Agustus 1958
5. Alamat : Jl. Mulyosari Tengah VI/1 Surabaya, 60112  
Telpon : 031-5935101  
HP 081 330 431 600
6. Agama : Islam
7. Pendidikan : S-1 (Fak. Sos-Pol Universitas Gadjah Mada, lulus 1982)  
S-2 (Magister Sains Pascasarjana UGM, lulus 1992)
8. Pekerjaan : Dosen Tetap FISIP Unair
9. Bidang Keahlian : Sosiologi Industri dan Sosiologi Pembangunan

**KARIER DI BIDANG KEAHLIAN**

- 1982 – sekarang : Dosen Program Studi Sosiologi FISIP Unair  
 1993 – sekarang : Peneliti Ikatan Sosiologi Indonesia Jatim  
 2008 – sekarang : Ketua Divisi Penelitian dan Informasi Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur

**PENGALAMAN AKADEMIS: TERKAIT**

Sebagai Pengampu Mata Kuliah:

- Sosiologi Industri (FISIP UNIVERSITAS AIRLANGGA)
- Sosiologi Pembangunan (FISIP UNIVERSITAS AIRLANGGA)
- Metode Penelitian Sosial (FISIP UNIVERSITAS AIRLANGGA)

**PENGALAMAN PENELITIAN ANTARA LAIN:**

NO.	TAHUN	PENELITIAN/PENDAMPINGAN	SUMBER DANA
1.	1984	Pengaruh Industri Kecil Thd. Penyerapan Tenaga Kerja Masy. Sekitar	DPP/SPP 1983/1984 Unair
2.	1985	Wanita di Sektor Informal	DPP/SPP Unair
3.	1986	Respon Masyarakat Terhadap Rumah Susun Di Kotamadya Surabaya	DPP/SPP Unair OPF Unair
4.	1989	Respons Petani di Pedesaan Terhadap Program TRI di Kabupaten Nganjuk	DPP/SPP Unair Dirjen. Dikti
5.	1992	Wanita dan Industri di KMS	
6.	1993	Kehidupan Buruh Wanita di KMS	DPP/SPP Unair

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Airlangga

7.	1994	Wanita Pekerja Di sekor Industri Rumahan	
8.	1995	Wanita Yang Bekerja di Luar Sektor Pertanian	Kantor Menteri
9.	1996	Community Support System Bagi Wanita Yang bekerja di Jawa Timur	Kependudukan/ BKKBN
10.	1996	Wanita di Sektor Industri Rumahan (Suatu Kajian Gender)	DP3M
11.	1996	Profil Kedudukan dan Peranan Wanita Di Jawa Timur	Bappeda Jatim
12.	1997	Studi Monitoring Program Kukesra dan Takesra di Kotamadya Surabaya dan Kabupaten Jember	BKKBN Pusat
13.	1997	Profil Peningkatan Peranan Wanita Di Kotamadya Surabaya	Bappeda KMS
14.	1997	Profil Kedudukan dan Peranan Wanita Di Kabupaten Gresik	Bappeda Gresik
15.	1997	Profil Kedudukan dan Peranan Wanita Di Kabupaten Mojokerto	Bappeda Kab. Mojokerto
16.	1997	Profil Kedudukan dan Peranan Wanita Di Kabupaten Sumenep	Bappeda Kab. Sumenep
17.	1998	Profil Kedudukan dan Peranan Wanita Di Kabupaten Sidoarjo	Bappeda Kab. Sidoarjo
18.	1998	Review Profil Kedudukan dan Peranan Wanita Di Kotamadya Surabaya	Bappeda KMS
19.	1998	Penyusunan Rencana Peningkatan Peranan Wanita (P2W) Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Kotamadya Surabaya	Bappeda KMS
20.	1998	Studi Evaluasi Program IDT di Kabupaten Sidoarjo	Bappeda Kab. Sidoarjo
21.	1998	Pendampingan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sosial di Kabupaten Sidoarjo	Bappeda Kab. Sidoarjo
22.	1998	Penyusunan Program Peningkatan Peranan Wanita di Kabupaten Gresik	Bappeda Kab, Gresik
23.	1999	Review Profil Kedudukan dan Peranan Wanita di Kabupaten Gresik	Bappeda Kab. Gresik
24.	1999	Studi Awal Situasi dan Penyusunan Kebijakan Sektor Sosial (Social Sector Strategy and Capacity Building / S3CB) di Kabupaten Sidoarjo	Bappeda Kab. Sidoarjo
25.	1999	Studi Aplikasi Program P2W di Kabupaten Sidoarjo	Bappeda Kab. Sidoarjo
26.	1999	Studi Aplikasi Program P2W di Kabupaten Gresik	Bappeda Kab. Gresik
27.	1999	Penyusunan Rencana Peningkatan Peranan Wanita Dalam Upaya Meningkatkan	Bappeda KMS
28.	1999	Pendapatan Keluarga Miskin dan Korban PHK di Kotamadya Surabaya	Kanwil Depkop P dan M Jatim
29.	2000	Pendampingan Pengembangan Jaringan Usaha Koperasi di Kabupaten Jember (	
30.	2000-	Pendampingan pada proyek Special Initiatives For Women Unemployment (SIWU) di Kabupaten Gresik	Cipta Karya (Dep. Pemukiman dan Prasaran Wilayah).

31.	2001	Studi Tentang Konflik dan Integrasi Pada Masyarakat Transisional	Meneg. Ristek RI
32.	2000	Anak Jalanan Perempuan (Studi Kualitatif tentang Strategi Mempertahankan Hidup dan Tindak Kekerasan Seksual yang dialami Anak Jalanan Perempuan	Dirjen Dikti RI
33.	2001	Pola Pemberdayaan Anak Jalanan	Dirjen Dikti RI
34.	2001	Penyusunan Model Pembangunan Perempuan Miskin di Kota Surabaya	Bappeko Surabaya
35.	2002	Profil Potensi Perempuan di Kabupaten Sidoarjo	Dinas Sosial Kab Sidoarjo
36.	2002	Profil Kesejahteraan dan Perlindungan Anak di Jawa Timur	Kantor Kement PP
37.	2002	Penyusunan Model Pembangunan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak di Jawa Timur	Kantor Kement PP
38.	2002	Peningkatan Kemampuan dan Kapasitas Kelembagaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak di Pedesaan	Kantor Kement PP
39.	2002	Ideologi Feminisme Gerakan Buruh di Kota Surabaya	Dirjen Dikti RI
40.	2003	Bentuk-bentuk Eksploitasi Pekerja Anak di Sektor Perkebunan Komersial	Dirjen Dikti RI
41.	2004	Analisis Peran Perempuan Dalam Kewirausahaan Guna Mendukung Kegiatan Eksplorasi Migas di Jawa Timur.	Balitbang Propinsi Jawa Timur
42.	2005	Pola Pemanfaatan Kredit Usaha Di Kalangan Pedagang Kaki Lima (PKL) Paguyuban Gotong Royong Di Kota Surabaya	Dirjen Dikti RI
43.	2005	Konsultan Partisipasi Politik Perempuan Analisis Peran Perempuan Dalam	Cakrawala Timur dan Partnership
44.	2006	Kewirausahaan Guna Mendukung Kegiatan Eksplorasi Migas di Jawa Timur	Kerjasama LPPM Unair dan
45.	2007	Penyusunan Program Antisipasi dan Penanganan Konflik Industrial di Propinsi Jawa Timur	Balitbang Jatim Kerjasama LPPM Unair dan Bappeprop Jawa Timur
46.	2009-	Pemetaan dan Penyusunan Model Penyelesaian Konflik Industrial di Jawa Timur	Dikti, Stranas
47.	2010	Pemetaan Konflik Industrial	RKAT
48.	2010	Peluang Penggunaan Produksi Dalam Negeri Bagi Generasi Muda di Jawa Timur	Kerjasama LPPM Unair dengan Desperindag Jawa Timur

## PUBLIKASI:

1. **WANITA DAN INDUSTRI RUMAHAN (Studi Tentang Strategi Kelangsungan Hidup Buruh Wanita di Kotamadya Surabaya) Tahun 1995 Dalam Perangkap Kemiskinan Dan Strategi Pengentasannya** Penerbit Airlangga University Press Surabaya
2. **Metode Penelitian Sosial 1996** Airlangga University Press Surabaya
3. **Wanita Dari Subordinasi dan Marjinalisasi Menuju ke Pemberdayaan, 1996** Airlangga University Press Surabaya
4. **Anak Perempuan Korban Kekerasan, 2000,** Lutfansah Mediatama Surabaya
5. **Eksplorasi Pekerja Anak Di Sektor Berbahaya di Jawa Timur, 2001,** Lutfansah Mediatama Surabaya
6. **Anak Jalanan Perempuan (Studi Kualitatif tentang Kekerasan Pada Anak Jalanan Perempuan), 2002,** Lutfansah Mediatama Surabaya
7. **Pendidikan Dasar : Mengurai Problem Pendidikan Gender Pada Sekolah Dasar, 2002,** Majalah Kebudayaan, Masyarakat dan Politik, Lutfansah Mediatama Surabaya
8. **Perempuan Miskin: Mengkritisi Program Pembangunan Perempuan di Kota Surabaya,** Jurnal Kota Surabaya, 2002, Lutfansah Mediatama Surabaya
9. **Kebijakan Publik Yang Berperspektif Gender Dalam Era Otonomi Daerah (Suatu Studi di Propinsi Jawa Timur), 2004,** Majalah Kebudayaan, Masyarakat dan Politik, Lutfansah Mediatama Surabaya
10. **"Ideologi Feminisme Gerakan Buruh di Kota Surabaya", dalam *Jurnal Penelitian: DINAMIKA SOSIAL*, Vol. 5 No. 1, Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Surabaya, 2004**
11. **"Bentuk-bentuk Eksploitasi Pekerja Anak di Sektor Perkebunan Komersial", dalam *Jurnal Penelitian: DINAMIKA SOSIAL*, Vol. 5 No. 2, Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Surabaya, 2004**
12. **"Stratifikasi Sosial: Unsur, Sifat & Perspektif", dalam Buku: *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, (Edisi Pertama)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004 (ISBN: 979-3465-81-6)**
13. **"Gender dan Kajian Tentang Perempuan", 2004 dalam *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, (Edisi Pertama)*, Prenada Media, Jakarta**
14. **Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan (Editor), 2005,** Kencana Prenada Media, Jakarta
15. **"Pengolahan dan Analisis Data Kuantitatif", dalam Buku: *METODE PENELITIAN SOSIAL, Berbagai Alternatif Pendekatan*, Kencana Prenada Media Group, 2005 (ISBN: 979-3465-92-1)**
16. **Penulis: "Pengantar" Buku *Berperan Tapi Dipinggirkan: Wajah Perempuan dalam Ekonomi*, Kerjasama Konsorsium Suara Perempuan dan Ford Foundation, 2005**

17. Analisis Peran Perempuan Dalam Kewirausahaan Guna Mendukung Kegiatan Eksplorasi Migas di Jawa Timur, (Editor), 2006, Kerjasama LPPM Universitas Airlangga dan Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Jawa Timur, Lutfansah, Surabaya
18. Konflik Industrial: Tarik-Ulur Antara Kepentingan Negara, Pengusaha dan Buruh Majalah Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik, Lutfansah Mediatama Surabaya 2002 ISSN 0216-2407 (Terakreditasi), 2008
19. *The Principal Components of Neo-liberal Thought and Examine How Important This Thought Has Been for Development Policy Since The 1970s* (Sutinah dan Muryani) Jurnal Sosiologi "Dialektika" Fisip, Universitas Airlangga, Vol 1, No. 1, Juli 2009
20. *Pursuing A Corporate Social Responsibility Agenda Case Study: Coca-cola's Company* (Muryani dan Sutinah), Jurnal Sosiologi "Dialektika" Fisip, Universitas Airlangga, Vol 1, No. 1, Juli 2009
21. "Teori Sosial Neo-Marxian" dalam Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial, Aditya Media Publishing, Malang, 2010
22. *Teori Simulations- Jean Baudrillard* dalam Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial, Aditya Media Publishing, Malang, 2010
23. Globalisasi: Dampak dan Respon Bagi Negara Dunia Ketiga dalam Jurnal Sosiologi "Dialektika" Fisip, Universitas Airlangga, Vol 6, No. 1, Maret 2010

Surabaya, 1 Pebruari 2013

Dra. Sutinah, MS  
NIP. 19580816 198203 2 001





